

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sedangkan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah wajib menyusun Dokumen perencanaan strategis untuk jangka waktu 2024-2026 yang kemudian dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan. Penyusunan renja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 tidak terlepas dari sinergitas antar dokumen perencanaan daerah baik secara vertikal dengan perencanaan tingkat pusat atau Kementerian/Lembaga maupun secara horisontal dengan perencanaan antara Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan renja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata provinsi Jawa Tengah mengacu dan melakukan penelaahan pada perencanaan tingkat pusat Kementerian/ Lembaga yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif. Penelaahan dokumen perencanaan juga dilakukan terhadap RPD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 kemudian sinergitas dan rumusan strategi kebijakan pengembangan kepemudaan, olahraga dan pariwisata kedepan saling mendukung satu dengan lainnya.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Perangkat daerah menerima SE Gubernur tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
2. Forum Perangkat Daerah
3. Input Eplanning Renja Perangkat Daerah
4. Penyampaian rancangan renja perangkat daerah ke Bappeda (sebagai bahan verifikasi)
5. Pra Musrembang Provinsi dan Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah
6. Perumusan rancangan akhir renja
7. Penyampaian rancangan akhir renja perangkat daerah (Sebagai bahan verifikasi)
8. Verifikasi rancangan akhir renja
9. Penetapan renja perangkat daerah

Prinsip-prinsip didalam penyusunan rancangan Renja-PD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Penyusunan Renja-PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
3. Rumusan program/kegiatan didalam Renja-PD didasarkan atas pertimbangan urutan pelayanan wajib/pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun  $n$  dan tahun  $n+1$ .



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
26. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 35);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi

- Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
  32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
  33. Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  35. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0262 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019;
  36. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024;
  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
43. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
44. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
45. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2024, dimaksudkan sebagai dokumen resmi dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2023.

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah:

- a. Sebagai penjabaran dan tindak lanjut Renstra Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata dan RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026
- b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- c. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- d. Menjadi alat evaluasi dan pengukuran kinerja bagi keberhasilan dalam mencapai tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- e. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata di Jawa Tengah;
- f. Sebagai instrumen bagi masyarakat dan stakeholder dalam mengukur keberhasilan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Rencana Kerja Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud, Tujuan dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

Bab ini memuat reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, reviu terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab ini menguraikan tentang telaah terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran perangkat daerah

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja perangkat daerah Tahun 2024 dan rencana maju Tahun 2025.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan mengemukakan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD**

Pelaksanaan rencana kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu pada APBD Tahun 2023. Secara lengkap evaluasi Program, Kegiatan, Indikator Program dan Indikator Kegiatan dapat dilihat dari tabel

2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (RenstraPD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PDTahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun2023	
					Target Renja PD	RealisasiRenja PD	Tingkat Realisasi(%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/dTahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target RenstraPD (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100\%$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100\%$
<b>1</b>	<b>Urusan Pemerintahan</b>									
<b>2</b>	<b>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b>									
2.1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1. Persentase capaian kapasitas kepemudaan	%	0	64,04	64,04	100	100	100	100
		2. Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda	%	0	13,04	13,04	100	16,3	16,3	100
2.1.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1. Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda	%	0	50	50	100	100	100	100
		2. Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda	%	0	50	50	100	100	100	100
2.1.2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	%	0	50	50	100	100	100	100
2.2	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	1. Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	0	43,33	43,33	100	45	45	100
		2. Persentase atlet PPLOP yang berprestasi	%	0	13,89	13,89	100	15	15	100
		3. Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik	%	0	100	100	100	100	97	97
2.2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Jumlah peserta yang mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan	%	0	50	50	100	100	100	100

		Olahraga								
2.2.2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	%	0	50	50	100	100	100	100
2.2.3	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	%	0	50	50	100	100	100	100
2.2.4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Antar PPLOP	%	0	33,33	33,33	100	100	100	100
<b>3</b>	<b>Urusan Pariwisata</b>									
3.1	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	164.717.928	11.530.429	43.864.056	253,62	17.295.375	53.885.106	
3.1.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1. Jumlah Tujuan Pasar Wisata Potensial	Kegiatan	0	1	1	100	1	1	100
		2. Jumlah Pelaku Pariwisata yang difasilitasi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kelompok	0	17	29	170,59	12	21	175
		3. Jumlah Pengguna Sarana Prasarana Pemasaran Pariwisata	Orang	1.350.000	400.000	400.000	100	350.000	200.000	57,14
3.2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP	%	0	69,57	69,57	100	78,26	82,61	105,56
		2. Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	%	0	56	88,40	157,86	70	83,18	118,83
3.2.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Lokasi	18	3	3	100	2	2	100
3.2.2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1. Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan	Lokasi	0	2	2	100	1	1	100
		2. Jumlah dokumen pengembangan Kawasan pariwisata	Dokumen	0	0	0	0	2	2	100
3.2.3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah fasilitasi pengelolaan destinasi pariwisata	Unit	0	0	0	0	2	1	50
3.2.4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Jumlah profil investasi Bidang Pariwisata	Jenis	0	0	0	0	1	1	100
		2. Jumlah usaha pariwisata (dari 8 jenis usaha pariwisata) yang memiliki TDUP	Unit	0	150	150	100	100	320	320
3.3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Kota Kreatif	%	0	5,71	11,43	200,18	5,71	5,71	100

3.3.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Kota Kreatif yang teruji petik	Unit	0	1	1	100	1	2	200
3.4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi Kompetensi	%	33,87	50,69	73,81	145,61	59,72	102,49	171,62
3.4.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1. Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang (dari rintisan ke mandiri)	Kelompok	0	1	1	100	1	1	100
		2. Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih	Orang	0	330	330	100	240	240	100
		3. Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang	Kelompok	0	4	4	100	2	2	100
		4. Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi	Orang	0	100	100	100	50	130	260

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata pada tahun 2022 dan tahun 2023 menunjukkan hasil yang positif dimana antara target yang telah disusun dalam dokumen rencana strategis. Adapun data lengkap kinerja pelayanan tersebut telah tersedia dalam Tabel 2.2 di bawah ini :

**TABEL 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**DISPORAPAR PROV. JATENG**

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Capaian Tahun 2023	Catatan Analisis
				2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan PORA							
	Persentase capaian kapasitas kepemudaan	-	-	64,06	100	64,06	100	
	Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda	-	-	13,04	16,3	13,04	16,3	
	Persentase Penysadaran dan Pemberdayaan pemuda	-	-	50	100	50	100	
	Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda	-	-	50	100	50	100	
	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	50	100	50	100	
	Persentase peningkatan prestasi olahraga	-	-	43,33	45	43,33	45	
	Persentase atlet PPLOP yang berprestasi	-	-	13,89	15	13,89	15	
	Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik	-	-	100	100	100	100	
	Persentase Jumlah peserta yang mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-	-	50	100	50	100	
	Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-	-	50	100	50	100	
	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	-	-	50	100	50	100	

	Olahraga							
	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Antar PPLOP	-	-	33,33	100	33,33	100	
	Urusan Pariwisata	-	-					
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	-	-	11.530.429	17.295.375	11.530.429	17.295.375	
	Jumlah Tujuan Pasar Wisata Potensial	-	-	1	1	1	1	
	Jumlah Pelaku Pariwisata yang difasilitasi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	-	-	17	12	17	12	
	Jumlah Pengguna Sarana Prasarana Pemasaran Pariwisata	-	-	400.000	350.000	400.000	350.000	
	Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP	-	-	69,57	78,26	69,57	78,26	
	Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	-	56	70	56	70	
	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	-	-	3	2	3	2	
	Jumlah KSP/KPPP yang dikembangkan	-	-	2	1	2	1	
	Jumlah dokumen pengembangan Kawasan pariwisata	-	-	0	2	0	2	
	Jumlah fasilitasi pengelolaan destinasi pariwisata	-	-	0	2	0	2	
	Jumlah profil investasi Bidang Pariwisata	-	-	0	1	0	1	
	Jumlah usaha pariwisata (dari 8 jenis usaha pariwisata) yang memiliki TDUP	-	-	150	100	150	100	
	Persentase Kota Kreatif	-	-	5,71	5,71	5,71	5,71	
	Jumlah Kota Kreatif yang teruji petik	-	-	1	1	1	1	
	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi Kompetensi	-	-	50,69	59,72	50,69	59,72	
	Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang (dari rintisan ke mandiri)	-	-	1	1	1	1	

	Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih	-	-	330	240	330	240	
	Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang	-	-	4	2	4	2	
	Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi	-	-	100	50	100	50	

## 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

### 2.3.1 Masalah dan Hambatan

Permasalahan pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah antara lain sebagai berikut :

1. Masih banyaknya pemuda menganggur dari keluarga miskin;
2. Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat nasional dan internasional;
3. Kurangnya sarana dan prasarana berstandart Nasional maupun Internasional;
4. Rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK;
5. Kurangnya kesinambungan pembibitan, pembinaan atlet dan kemitraan dengan stakeholder;
6. Belum adanya solusi dalam pemulihan aktifitas usaha pariwisata dan Daya tarik Wisata di Destinasi pariwisata;

Permasalahan tersebut kemudian dipetakan mulai dari masalah pokok sampai dengan akar masalah yang telah secara jelas terangkum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih Kurangnya Kapasitas	Masih banyaknya pemuda menganggur dari keluarga miskin.	1. Kurang optimalnya penyadaran, pemberdayaan 2. Rendahnya kewirausahaan pemuda.

2	Belum Optimalnya Kualitas Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat nasional dan internasional.</li> <li>2. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga berstandart Nasional maupun Internasional.</li> <li>3. Rendahnya kualitasSDM olahraga berbasisIPTEK.</li> <li>4. Kurangnya kesinambungan pembibitan, pembinaan atlet dan kemitraan dengan stakeholder.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimalnya pola pembibitan pembinaan</li> <li>2. Rendahnya</li> <li>3. Masih minimnya pelatihan SDM Olahraga berbasis IPTEK</li> <li>4. Masih lemahnya basis data SDM olahraga</li> <li>5. Kurang optimalnya pembudayaan olahraga di masyarakat.</li> <li>6. Masih belum optimalnya pembinaan</li> </ol>
3	Belum Optimalnya Pemulihan Sektor Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya solusi dalam pemulihan aktifitas usaha pariwisata dan Daya tarik Wisata di Destinasi pariwisata;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata.</li> <li>2. Perlu peningkatan kualitas dan aktifitas Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata</li> <li>3. Perlu meningkatkan kualitas pelayazzzznan pada sektor industri pariwisata.</li> <li>4. Perlu peningkatan penetrasi Pasar pada pasar - pasar baru potensial wisatawan</li> <li>5. Perlu mendorong pengembangan ceruk pasar sesuai dengan karakteristik wisatawan</li> <li>6. Perlu meningkatkan inovasi kualitas sarana prasarana</li> </ol>

			<p>informasi dan promosi pariwisata secara virtual.</p> <p>7. Perlu meningkatkan kualitas</p> <p>8. Perlu meningkatkan kemampuan profesionalitas</p> <p>9. Perlu pengembangan pemberdayaan kewirausahaan masyarakat di</p> <p>10. Perlunya Pengembangan Kompetensi Pelaku 8 Subsektor Ekonomi Kreatif</p> <p>11. Perlunya meningkatkan nilai tambah produk Ekonomi kreatif</p> <p>12. Perlu pengembangan dan kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
--	--	--	--

## 232. Tantangan

Berangkat dari kondisi dan capaian pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, maka kemudian ada beberapa aspek yang menjadi tantangan bagi pengembangan pelayanan di Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata kedepannya, yaitu :

### A. Bidang Kepemudaan

- 1) Gencarnya nilai-nilai asing yang masuk ke Jawa Tengah melalui berbagai media.
- 2) Lemahnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif.
- 3) Belum terbangunnya jiwa kewirausahaan dan kemampuan pengembangan ekonomi produktif dan kreatif di kalangan pemuda.
- 4) Masih rendahnya partisipasi organisasi dan pemuda secara aktif dalam pembangunan daerah.

### B. Bidang Keolahragaan

- 1) Semakin ketatnya persaingan prestasi olahraga di tingkat nasional.
- 2) Meningkatnya kualitas IPTEK keolahragaan di tingkat nasional.
- 3) Masih terbatasnya perguruan tinggi yang memberikan kemudahan seleksi masuk kuliah kepada atlet berprestasi.
- 4) Belum maksimalnya dukungan orang tua terhadap profesi atlet.
- 5) Berkembangnya olahraga rekreasi yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kegemaran dan kemampuan.

### C. Bidang Pariwisata

- 1) Meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata ditingkat nasional.
- 2) Penguatan penetrasi pasar – pasar baru potensial wisatawan dan pembukaan ceruk pasar wisatawan sesuai dengan karakteristiknya.
- 3) Pemulihan kualitas sumber daya manusia dan lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif.

### **233. Peluang**

Adapun yang menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yaitu:

#### **A. Bidang Kepemudaan**

- 1) Jumlah dan potensi generasi muda yang besar serta meningkatnya organisasi atau kelompok kepemudaan dan keolahragaan yang masih perlu untuk diberdayakan.

#### **B. Bidang Keolahragaan**

- 1) Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat untuk memiliki kehidupan yang sehat melalui olahraga.
- 2) Meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap berbagai event olahraga baik secara nasional maupun internasional.

#### **C. Bidang Pariwisata**

- 1) Kekayaan dan keragaman Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan.
- 2) Pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah dan destinasi.
- 3) Meningkatnya industri jasa dan sarana pariwisata.
- 4) Berkembangnya event dan promosi pariwisata di daerah.
- 5) Berkembangnya media sosial.
- 6) Ketersediaan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 7) Kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang semakin meningkat.
- 8) Tersedianya lembaga bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

### **234. Isu Strategis**

Beberapa isu – isu strategis yang menjadi isu Kepemudaan dan Keolahragaan dan Pariwisata di Provinsi Jawa Tengah yang harus segera ditindaklanjuti untuk membangun Kepemudaan dan Keolahragaan dan Pariwisata yang lebih baik yaitu :

1. Peningkatan ekonomi pemuda.
2. Peningkatan prestasi kepemudaan dan keolahragaan.
3. Peningkatan dan pemulihan daya saing kepariwisataan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata.

#### **2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Tengah, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan. Salah satu pendukung pencapaiannya yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah melalui Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Klaster dan Kegiatan Pengembangan Kepedulian Dan Kepeloporan pemuda yang diampu oleh Bidang Kepemudaan serta Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Sumber Daya Manusia Pariwisata yang diampu oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Hal ini penting untuk meningkatkan akses pendidikan menengah, mencegah anak putus sekolah dan mengupayakan memutus mata rantai kemiskinan.

**TABEL 2.4**  
**REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
<b>I</b>	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>					
	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>					<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>					
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prov. Jateng	Jumlah wirausaha muda mandiri	8 Orang	12.739.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prov. Jateng	Jumlah wirausaha muda mandiri	8 Orang	12.739.000.000	-
			Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	50 Organisasi	6.300.000.000			Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	50 Organisasi	6.300.000.000	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prov. Jateng	Persentase peningkatan perolehan medali	28,18%	185.248.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prov. Jateng	Persentase peningkatan perolehan medali	28,18%	185.248.000.000	-
			Jumlah masyarakat yang bugar	750 Orang	1.600.000.000			Jumlah masyarakat yang bugar	750 Orang	1.600.000.000	-
			Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi	50 Orang	14.950.000.000			Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi	50 Orang	14.950.000.000	-
	<b>URUSAN PARIWISATA</b>					<b>URUSAN PARIWISATA</b>					
3	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prov. Jateng	Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	13,33 %	4.533.575.000	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prov. Jateng	Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	13,33 %	4.533.575.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prov. Jateng	Jumlah kunjungan wisatawan	49.985.228 orang	46.200.000.000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prov. Jateng	Jumlah kunjungan wisatawan	49.985.228 orang	46.200.000.000	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Prov. Jateng	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan)	6 Kab/Kota	825.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Prov. Jateng	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan)	6 Kab/Kota	825.000.000	
			Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	48,98 %	3.615.000.000			Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	48,98 %	3.615.000.000	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, maupun perangkat daerah kabupaten kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi. Usulan diperoleh dari sistem perencanaan [eplanning.jatengprov.go.id](http://eplanning.jatengprov.go.id) untuk bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Secara lengkap usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan terangkum dalam tabel 2.5 berikut ini :

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku**  
**Keperentingan Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah**

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Provinsi Jawa Tengah

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BESARAN/VOLUME</b>	<b>CATATAN *)</b>
1	FGD KEPEMUDAAN LINTAS SEKTOR	Provinsi Jawa Tengah	-	582.180.000	-
2	Hibah Bidang Kepemudaan	Provinsi Jawa Tengah	-	100.000.000	-
3	HIBAH BIDANG KEPEMUDAAN REGULER OPD	Provinsi Jawa Tengah	-	5.450.000.000	-
4	Hibah Bidang Keolahragaan Reguler OPD	Provinsi Jawa Tengah	-	117.000.000.000	-
5	Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga	Provinsi Jawa Tengah	-	4.250.000.000	-
6	Hibah Bidang Kepariwisata	Provinsi Jawa Tengah	-	125.000.000	-
7	Hibah Bidang Kepariwisata	Provinsi Jawa Tengah	-	815.000.000	-

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN**  
**PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**

**3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

**3.1.1. Kementerian Pemuda dan Olahraga**

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia juga telah menyusun Renstra periode tahun 2024-2026. Dalam Renstra tersebut dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai Tupoksi. Visi Dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga periode 2019-2024 yaitu: “Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Adapun Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2019-2024 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;
2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;
5. Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Dari Visi dan Misi tersebut Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kemudian menyusun prioritas Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah berpedoman pada Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN Tahun 2019-2024, dengan demikian begitu diharapkan nantinya akan dapat memaksimalkan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaannya.

Rumusan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pemuda yang memiliki karakter dan kemandirian.
2. Menguatnya kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter.
3. Meningkatkan sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.
4. Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas.
5. Meningkatkan prestasi olahraga yang unggul serta hebat.

### **3.12. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Merujuk pada Visi dan Misi terkait pariwisata yang termuat dalam Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2019-2024 dijelaskan bahwa Visi Kementerian Pariwisata adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan” dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional;
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional

yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Berdasarkan visi misi Kementerian Pariwisata 2019-2024, maka berikut ini adalah tujuan Kementerian Pariwisata 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional;
2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
3. Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif;
4. Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.

Merujuk pada Visi dan Misi terkait ekonomi kreatif berdasarkan visi Badan Ekonomi Kreatif yang saat ini telah melebur kedalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah “membangun Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam ekonomi kreatif pada 2030 nanti” dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu:

1. Menyatukan seluruh aset dan potensi kreatif Indonesia untuk mencapai ekonomi kreatif yang mandiri;
2. Menciptakan Iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif;
3. Mendorong inovasi di bidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing di dunia internasional;
4. Membuka wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap segala aspek yang berhubungan dengan ekonomi kreatif;

5. Membangun kesadaran dan apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk perlindungan hukum terhadap hak cipta;
6. Merancang dan melaksanakan strategi yang spesifik untuk menepatkan Indonesia dalam peta ekonomi kreatif dunia.

### **3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**

Tujuan dapat diartikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan tersebut dibuat dengan berpedoman pada visi dan misi kepala daerah serta berdasarkan isu-isu dan analisis strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Dari visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata mendukung pencapaian **misi ketiga** yaitu “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk **mengurangi kemiskinan dan pengangguran**” dan **misi keempat** yaitu “Menjadikan rakyat Jawa Tengah **lebih sehat**, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan”. Untuk itu, dari misi yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026 perlu dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa tujuan dan sasaran di tingkat Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

#### **Tujuan I : Meningkatkan Kualitas Pemuda**

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Kepemudaan yaitu Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian Pemuda.

#### **Tujuan II : Meningkatkan Kualitas Olahraga Daerah**

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Keolahragaan yaitu Meningkatkan Pembinaan Olahraga Jawa Tengah.

### **Tujuan III : Meningkatkan Pembangunan Kepariwisata**

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Pariwisata yaitu Meningkatkan Jumlah Pengeluaran Wisatawan.

### **Tujuan IV : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah**

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Pelayanan Umum Kesekretariatan yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah; dan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah juga telah disusun dengan indikator sasaran yang diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun tertentu. Oleh sebab itu, berikut akan dijelaskan tentang tujuan, sasaran beserta indikator tahun 2024 sebagaimana tabel 3.1 di bawah ini :

**Tabel 3.1.**

#### **Tujuan Dan Sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Pemuda		Indeks Pembangunan Pemuda	%	56.85
		Meningkatnya Lapangan dan kesempatan kerja pemuda	Persentase lapangan dan kesempatan kerja pemuda	%	11.05
		Meningkatnya Partisipasi dan kepemimpinan pemuda	Persentase partisipasi dan kepemimpinan pemuda	%	37.25
2	Meningkatkan Kualitas Olahraga Daerah		Indeks Pembangunan Keolahragaan	%	0,42
		Meningkatnya Pembinaan Olahraga Jawa Tengah	Peningkatan prestasi olahraga tingkat nasional	Level	4
		Meningkatnya Tingkat kebugaran masyarakat	Persentase tingkat kebugaran masyarakat	%	0.183
3	Meningkatkan Pembangunan		Pertumbuhan PDRB BidangPariwisata	%	8.01

	Kepariwisataan		Nilai tambah ekonomi kreatif	Rp	1.686.000.000
		Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Wisatawan	Nilai Pengeluaran Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	Rp/ Kapita	14.054.297
4	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	%	79.31
5	Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	%	75
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Nilai	3.01

### 3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Pelayanan Perangkat Daerah Tidak Maksimal	9	Disporapar Prov Jateng	Kurangnya Peningkatan Kapasitas Sdm	Tidak Optimalnya Pelayanan Perangkat Daerah
Mendapatkan Nilai Yang Kurang Baik Saat Evaluasi Kinerja	9	Disporapar Prov Jateng	Tidak Terorganisirnya Pelaksanaan Kegiatan	Kinerja Tidak Tercapai
Tidak terselenggaranya kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan	9	Disporapar Provinsi Jawa Tengah	Tidak Optimalnya Perencanaan, perubahan teknis secara mendadak	Mendapatkan catatan evaluasi
Ketidaksesuaian dalam penyajian laporan keuangan	6	Disporapar Provinsi Jawa Tengah	Audit Internal belum berjalan secara optimal	Menjadi catatan pemeriksa
Rusaknya peralatan penunjang perangkat daerah	6	Disporapar Prov Jateng	Perawatan barang yang kurang optimal	Tidak optimalnya pelaksanaan pelayanan perangkat daerah
-				
Kesalahan administrasi kepegawaian perangkat daerah	6	Disporapar prov Jateng	Kurangnya optimalnya pelayanan kepegawaian	Pelayanan Perangkat Daerah tidak optimal
Tidak optimalnya pelayanan perangkat daerah	6	Disporapar Prov Jateng	Tidak terpenuhinya standar pelayanan PD	Nilai Kepuasan Masyarakat Rendah
Rusaknya barang penunjang perangkat daerah	9	Disporapar Prov Jateng	Barang yang ada tidak sesuai spesifikasi	tidak optimalnya pelayanan perangkat daerah
Mendapatkan komplain terkait penyediaan jasa penunjang	6	Disporapar Prov Jateng	tidak optimalnya perencanaan	Tidak optimalnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Rusaknya barang penunjang perangkat daerah	6	Disporapar Prov Jateng	Kurangnya pemeliharaan	Pelayanan perangkat daerah terganggu
Kurangnya Kualitas Dan Daya Saing Pemuda Dalam Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Ekonomi	12	Pemuda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin Berkembangnya Kebutuhan Pasar</li> <li>2. Kurangnya Inovasi Wirausaha Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemuda</li> <li>3. Kurangnya Ilmu Dan Keterampilan Yang Dimiliki Pemuda</li> <li>4. Minimnya Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Pemuda Untuk Mengembangkan Wirausaha</li> <li>5. Minimnya Fasilitasi Untuk Pemuda Agar Dapat Mengembangkan Wirausaha</li> <li>6. Kurangnya Modal Yang Dimiliki Pemuda Untuk Memulai Usaha</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya Kepercayaan Diri Pemuda Untuk Memulai Wirausaha</li> <li>2. Ide Inovasi Yang Dimiliki Pemuda Tidak Dapat Dijalankan</li> <li>3. Kurang Berkembangnya Pemuda Dalam Sektor Ekonomi</li> <li>4. Kurangnya Minat Dari Pemuda Untuk Berwirausaha</li> <li>5. Kurangnya Lapangan Pekerjaan Yang Akan Tercipta</li> <li>6. Kurangnya Wirausaha Sukses Di Usia Pemuda</li> </ol>
Kurang Berkembangnya Pemuda Peserta Program PKKP di Desa Penempatan	12	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya modal awal yang dimiliki Peserta</li> <li>2. Kurangnya kemampuan membangun kepercayaan dari masyarakat</li> <li>3. Kurangnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa sulit untuk dilembangkan potensinya</li> <li>2. Jumlah pemuda di desa semakin berkurang karena minimnya lapangan</li> </ol>

			<p>keterbukaan dari masyarakat untuk berinovasi</p> <p>4. Kurangnya sarana dan prasarana di Desa</p> <p>Penempatan untuk mengembangkan diri</p> <p>5. Waktu yang dirasa masih kurang sehingga tidak bisa mendalami dan mengembangkan potensi desa</p> <p>6. Semakin minimnya jumlah pemuda di desa</p>	<p>pekerjaan</p> <p>3. Tidak adanya inovasi baru dalam pengembangan desa</p> <p>4. Produktivitas ekonomi di desa menjadi rendah</p>
Jumlah pemuda kader provinsi dari seluruh kab/kota yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	12	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	kurangnya penyadaran dan daya saing pemuda di era globalisasi	<p>1. kurang bersaingnya pemuda di era globalisasi</p> <p>2. terkikisnya jiwa Nasionalisme</p> <p>3. berkurangnya jiwa kepeloporan para pemuda</p>
Kurangnya Minat Pemuda Untuk Berwirausaha Dalam Upaya Peningkatandaya Saing Dan Kemandirian Ekonom	12	Pemuda	<p>1. Kurangnya modal untuk memulai berwirausaha</p> <p>2. Kurangnya minat pemuda untuk memulai berwirausaha</p> <p>3. Kurangnya sarana dan prasarana Pemuda untuk memulai wirausaha</p> <p>4. Kurangnya fasilitasi Pemuda untuk memulai wirausaha</p> <p>5. Kurangnya ilmu dan kemampuan Pemuda dalam manajemen wirausaha</p> <p>6. Kurangnya mentor bagi Pemuda untuk memulai wirausaha</p>	<p>1. Kurangnya kepercayaan diri Pemuda untuk mulai berwirausaha</p> <p>2. Kurangnya inovasi wirausaha dari Pemuda</p> <p>3. Kurangnya jumlah wirausaha dari Pemuda</p> <p>4. Kurangnya lapangan pekerjaan baru</p>
Penurunan Moral Dan Pengetahuan Pendidikan Kesehatan	25	Pemuda	kurangnya pemahaman pemuda terhadap nilai-nilai luhur pancasila dan pengetahuan pendidikan kesehatan	menurunnya moralitas para pemuda terhadap kehidupan bermasyarakat dan kurangnya pengetahuan terhadap pendidikan kesehatan
Rendahnya Kesadaran Pemuda Untuk Partisipasi Dalam Organisasi Kepemudaan	6	Provinsi Jawa Tengah	Kurangnya Sosialisasi Dan Pendampingan Pemuda Dalam Membangkitkan Kesadaran Untuk Pemuda Dalam Berpartisipasi	Kepesertaan Pemuda Dalam Organisasi Rendah
Pemuda Enggan Untuk Berpartisipasi Dalam Organisasi Kepemudaan	20	Pemuda	Kurangnya Sosialisasi Dan Pendampingan Pemuda	Kemandirian Dan Karakter Pemuda Berkurang
Kegiatan Pemuda Tidak Terorganisir	25	Pemuda	kurangnya pemahaman pemuda untuk berorganisasi	tidak adanya organisasi kepemudaan
Tidak tercapainya target perolehan medali	9	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Disporapar Prov. Jateng	atlet-atlet yang berpotensi pindah ke daerah lain	perolehan medali tidak naik atau bahkan bisa jadi turun sebab perpindahan atlet-atlet berpotensi tersebut
Tidak terselenggaranya	9	Pemerintah Provinsi Jawa	Minimnya alokasi dana yang dianggarkan untuk	Beberapa pertandingan tidak

kejuaraan/kompetisi		Tengah, Disporapar Prov. Jateng	penyelenggaraan kejuaraan atau keikutsertaan/pastisipasi dalam kejuaraan olahraga	terselenggara dengan baik dari segi teknis pertandingan dan yang lainnya.
Kurang optimalnya penyediaan data dan informasi keolahragaan di Jawa Tengah	6	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Disporapar Prov. Jateng	Data tidak di update secara berkala, Keterbatasan SDM yang berkompetensi di daerah	Penyediaan data keolahragaan tidak tersaji dengan baik sehingga masyarakat atau stakeholder tidak mendapatkan informasi keolahragaan secara menyeluruh. Menurunnya daya saing keolahragaan di Jawa Tengah.
Prestasi di tingkat olahraga pendidikan menurun	9	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Disporapar Prov. Jateng	Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga Masih minimnya jumlah kompetisi/kejuaraan olahraga di Provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat olahraga pendidikan menurun dari tahun sebelumnya
Turunnya Tingkat Kebugaran Masyarakat	6	Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Masih Rendahnya Budaya Berolahraga	Turunnya Persentase Masyarakat Yang Bugar, Banyak Masyarakat Yang Tidak Sehat Dan Rentan Sakit
Pengembangan Kawasan Pariwisata Tidak Disertai Dengan Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya	6	Disporapar	Perencanaan Lintas Sektoral Pada Pengembangan Kawasan Pariwisata Dari Segi Aksesibilitas, Atraksi, Amenitas, Aktivitas, Akomodasi, Dan Ancilliary Kurang Terkoordinasi	Hasil Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Tidak Dapat Dimanfaatkan Secara Optimal
Pengembangan Aset Pariwisata Milik Provinsi Jawa Tengah	10	PPKom	Penyedia tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Kontruksi untuk PPKom sesuai dengan ketentuan Kontrak	Tidak tercapainya progres fisik sesuai kesepakatan kontrak, dikarenakan pihak kontraktor tidak memiliki manajemen keuangan internal yang baik atau tidak memiliki cukup modal untuk melaksanakan pekerjaan, (walaupun sudah mencairkan uang muka dan termin pembayaran) sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi terhambat
Menurunnya Perjalanan Dan Lama Tinggal Wisatawan Di Jawa Tengah	6	Provinsi Jawa Tengah	Kurangnya Dukungan Kepada Rendahnya Melalui Adaptasi Teknologi Digital, Strategi Pemasaran Bersama, Dan Transisi Ke Arah Pariwisata Berkelanjutan	Berkurangnya Pengeluaran Konsumsi Wisatawan
Menurunnya Jumlah	6	PROVINSI	Kurangnya Jenis Media	Menurunnya Traffic

Pengguna Sarpras Pemasaran Pariwisata		JAWA TENGAH	Informasi Pemasaran Pariwisata Yang Digunakan Dan Materi / Konten Informasi Pemasaran Pariwisata Yang Kurang Menarik	Pengguna Media Yang Dikelola Oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah
Menurunnya Jumlah Pengguna Saprass Pemasaran Pariwisata	6	Provinsi Jawa Tengah	Kurangnya jenis media informasi pemasaran pariwisata yang digunakan dan materi / konten informasi pemasaran pariwisata yang kurang menarik	Menurunnya traffic pengguna media yang dikelola oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah
Kurang Optimalnya Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri	6	Provinsi Jawa Tengah	1. Terbatasnya Jumlah Sdm Pengelola Pendataan Di Daerah; 2. Terlambatnya Pelaporan Data Tiap Bulannya; 3. Luasnya Cakupan Lokus Pendataan; 4. Target Pasar Potensial Jawa Tengah Belum Optimal Dilakukan ; 5. Terbatasnya Penentuan Peserta Famtrip.	1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Sebagai Bahan Penyusunan Kebijakan; 2. Menurunnya Daya Saing Pariwisata Jawa Tengah
Kurang Optimalnya Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri	6	Provinsi Jawa Tengah	1. Terbatasnya jumlah SDM pengelola pendataan di daerah; 2. Terlambatnya pelaporan data tiap bulannya; 3. Luasnya cakupan lokus pendataan; 4. Target pasar potensial Jawa Tengah belum optimal dilakukan ; 5. Terbatasnya penentuan peserta famtrip .	1. Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai bahan penyusunan kebijakan; 2. Menurunnya daya saing pariwisata Jawa Tengah.
Menurunnya Kualitas Promosi Pariwisata	6	Provinsi Jawa Tengah	Kurangnya Kualitas Promosi Dan Informasi Pariwisata	Menurunnya Minat Kunjungan Wisatawan Ke Jawa Tengah
Kab/Kota (Kata) Kreatif Yang Uji Petik Pmk3i Tidak Sesuai Target Waktu Yang Di Tentukan	6	Kab/Kota Dan Pelaku Ekonomi Kreatif	Kurangnya Pemerataan Pemahaman Pelaku Usaha Parekraf Dalam Kesempatan Memperoleh Manfaat Serta Mempersiapkan Sdm Pada Sub Sektor Ekonomi Kreatif (Khususnya Kriya, Kuliner Dan Fashion) Dalam Pengisian Borang, Ujipetik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif.	Pengajuan Tidak Dapat Diproses Oleh Kemenparekraf
Kab/Kota (Kata) Kreatif Yang Uji Petik PMK3I Tidak Sesuai Target Waktu Yang Di Tentukan	6	Disporapar	Kurangnya pemerataan Pemahaman pelaku usaha parekraf dalam kesempatan memperoleh manfaat serta mempersiapkan SDM pada Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Proses Pengisian dan pengajuan Uji petik Kab/Kota (KaTa) Kreatif menjadi lebih lama dan tidak sesuai dengan harapan (waktu tidak sesuai target)

			(Khususnya Kriya, Kuliner dan Fashion) dalam pengisian borang, uji petik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif.	
Kurang Meratanya Kesempatan Bagi Para Pelaku Ekonomi Kreatif Untuk Memperoleh Fasilitas Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual	6	Para pelaku ekonomi kreatif	Keterbatasan anggaran untuk kegiatan tersebut	Kurang maksimalnya pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah yang tersertifikasi Hak Kekayaan Intelektual
Kurangnya Mengimplementasikan Adaptasi, Inovasi, Dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dan Pelaku Parekrafkraf	6	Masyarakat Jawa Tengah	Rendahnya Komitmen Untuk Mendukung Penguatan Ekosistem Sektor Parekraf Melalui Pendekatan Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Parekraf Dalam Pembangunan Yang Berpusat Pada Masyarakat.	Tidak Meratanya Sdm Parekraf Yang Sudah Tersertifikasi
Kurangnya Mengimplementasikan Adaptasi, Inovasi, Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dan Pelaku Pariwisata	6	Masyarakat Jawa Tengah	Rendahnya Komitmen untuk mendukung Penguatan Ekosistem Sektor Pariwisata melalui pendekatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) Pariwisata dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat.	Tidak Meratanya SDM Pariwisata yang sudah tersertifikasi
Kurang Meratanya Kesempatan Bagi Para Pelaku Ekonomi Kreatif Untuk Memperoleh Fasilitas Pelatihan Ekonomi Kreatif Dan Sertifikasi Kompetensi	6	Para pelaku ekonomi kreatif	Keterbatasan anggaran untuk kegiatan tersebut	Kurang maksimalnya pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah yang terlatih dan tersertifikasi kompetensi
Kurangnya mengimplementasikan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi pemangku kepentingan dan Pelaku Parekrafkraf	6	Disporapar	Rendahnya komitmen untuk mendukung penguatan ekosistem sektor parekraf Melalui pendekatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Parekraf dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat.	Tidak Meratanya SDM Parekraf yang sudah tersertifikasi
Pembinaan Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (Pplop) Berprestasi Harus Ditingkatkan	9	Atlet Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (Pplop)	Pembinaan Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (Pplop) Mempunyai Potensi Besar Dalam Mencetak Atlet Nasional	Dalam Pelaksanaan Pembinaan Atlet Prestasi Membutuhkan Fasilitas Dan Pengalaman Dalam Bertanding Yang Cukup, Kebutuhan

				Dalam Progam Uji Tanding Dan Pengiriman Kejuaraan Dibutuhkan Untuk Dapat Mengevaluasi Hasil Pelatihan Dalam Pembinaan
Berkurangnya Peserta Yang Berpartisipasi Dalam Kejuaraan	6	Atlet PPLOP	1. Minimnya alokasi anggaran untuk Pengiriman Kejuaraan 2. Jadwal event kejuaraan yang belum pasti	Berkurangnya jumlah peserta yang berpartisipasi dalam Kejuaraan
1. Atlet Yang Tidak Mengikuti Pembinaan 2. Atlet Dan Pelatih Yang Tidak Berprestasi	16	Provinsi Jawa Tengah	1. Pembinaan Atlet yang kurang optimal 2. Kurangnya ketersediaan perlengkapan dan Sarana prasarana untuk Atlet Pelatih 3. Kurang Optimal Progam Pelatihan untuk Pelatih	Berkurangnya jumlah atlet dan pelatih milik daerah
Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah Masih Harus Ditingkatkan	9	Balai Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Tengah	Keterbatasan Kualitas Dan Kuantitas Sdm Pada Balai Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Kurang Cepat Penyelesaiannya, Dari Sisi Kepegawaian Masih Harus Ditingkatkan Pengelolaan Data Kepegawaiannya. Dari Sisi Administrasi Keuangan Penyelesaian Administrasi Keuangan Mengalami Keterlambatan
Proses Klaim Asuransi Sulit Dilakukan	9	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Tengah	Data dukung Klaim Asuransi tidak lengkap	Klaim Asuransi tidak dapat dilakukan
Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan Masih Lebih Banyak Dari Yang Tersedia	9	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Tengah	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang tersedia terbatas
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Yang Dibutuhkan Masih Lebih Banyak Dari Yang Tersedia	9	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Tengah	Barang Milik Daerah yang ada saat ini sudah belum dapat memenuhi kebutuhan atlet, pelatih dan masyarakat pengguna sarana prasarana olahraga di kawasan olahraga jatidiri	Kurang efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan atlet, pelatih dan masyarakat pengguna kawasan olahraga jatidiri
Penyediaan Tidak Tepat Waktu	6	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat

		Provinsi Jawa Tengah		
Meningkatnya Kerusakan Barang Milik Daerah Dan Kerusakan Barang Milik Daerah Terjadi Secara Bersamaan	9	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Tengah	Keterbatasan Anggaran dan Barang Milik Daerah yang biaya pemeliharaannya sangat mahal	Dengan kurang maksimalnya fungsi barang milik daerah mengakibatkan pelayanan umum dan masyarakat kurang maksimal dan terganggu

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**

#### **4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024**

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Undang- Undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan makna 'bersifat indikatif' adalah informasi tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan) hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Rencana program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang terdiri dari program dan kegiatan pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yaitu :

##### **4.1.1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

- a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi;
- b. Kegiatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi.

##### **4.1.2 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**

- a. Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
- c. Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Dan Industri Olahraga;
- d. Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
- e. Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga.

#### **4.1.3 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

- a. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi;
- b. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
- c. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

#### **4.1.4 Program Pemasaran Pariwisata**

- a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.

#### **4.1.5 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**

- a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkatan Lanjutan.

#### **4.1.6 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah.
- d. Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah.
- f. Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah.

- g. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Dan Minum Rapat Perangkat Daerah.
- h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah.
- i. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/ Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah.
- j. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah.
- k. Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor.
- l. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas.
- m. Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal.
- n. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran.

#### **4.1.7 Program Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya berikut akan dijelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatif tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 secara lengkap sebagaimana tabel 4.1 di bawah ini :

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024  
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

**Tabel 4.1. Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024  
dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah.**

Tujuan (1)	Sasaran (3)	Kode (5)	Program (6)	Kegiatan (8)	Sub Kegiatan (10)	Indikator Sub Kegiatan (11)	Satuan (12)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
								2024		2025	
								Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)
Meningkatkan Pembangunan Pemuda									19.039.000.000		43.670.000.000
						Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	56,85		58,25	
	Meningkatnya Lapangan dan kesempatan kerja pemuda *								12.739.000.000		29.345.000.000
						Persentase lapangan dan kesempatan kerja pemuda *	%	11,05	12.739.000.000	11,5	29.345.000.000
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN **						12.739.000.000		29.345.000.000
						Jumlah wirausaha muda mandiri **	Orang	8	12.739.000.000	10	29.345.000.000
		2.19.02.1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi ***					12.739.000.000		29.345.000.000
						Jumlah wirausaha muda ***	Orang	100	1.650.000.000	100	5.845.000.000
		2.19.02.1.01.0015			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi ****				1.650.000.000		5.845.000.000
						Jumlah Wirausaha Muda Provinsidari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya *****	Orang	400	1.650.000.000	1000	5.845.000.000
						Peningkatan jumlah lokus unggulan hasil pendampingan kepeloporan pemuda ***	Lokasi	100	7.280.000.000	100	15.250.000.000
		2.19.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi ****				3.155.000.000		5.500.000.000
						Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya *****	Orang	8000	3.155.000.000	12030	5.500.000.000

		2.19.02.1.01.001 2			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi ****			4.125.000.000		8.500.000.000
					Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan dari seluruh kabupaten/kota ****	Orang	120	4.125.000.000	200	8.500.000.000
		2.19.02.1.01.001 3			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi ****			-		1.250.000.000
					Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya ****	Orang	0	-	210	1.250.000.000
					Tersedianya data capaian IPP domain Pendidikan; Kesehatan dan kesejahteraan; gender dan diskriminasi ***	Dokumen	3	3.809.000.000	4	8.250.000.000
		2.19.02.1.01.001 0			Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda ****			275.000.000		700.000.000
					Jumlah dokumen penghargaan pemuda provinsi yang berprestasi dan menerima penghargaan yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan ****	Dokumen	2	275.000.000	3	700.000.000
		2.19.02.1.01.001 1			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi ****			1.184.000.000		300.000.000
					Jumlah dokumen hasil koordinasi sinergis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi RAD/RAD Tingkat Provinsi ****	Dokumen	3	1.184.000.000	1	300.000.000
		2.19.02.1.01.001 4			Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi ****			2.350.000.000		7.250.000.000

						Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan ****	Orang	1500	2.350.000.000	3000	7.250.000.000
	<b>Meningkatnya Partisipasi dan kepemimpinan pemuda *</b>								<b>6.300.000.000</b>		<b>14.325.000.000</b>
						Persentase partisipasi dan kepemimpinan pemuda *	%	37,25	6.300.000.000	38,75	14.325.000.000
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN **						6.300.000.000		14.325.000.000
						Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi **	Orang	50	6.300.000.000	75	14.325.000.000
		2.19.02.1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi ***					6.300.000.000		14.325.000.000
						Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan provinsi ***	Orang	125	6.300.000.000	250	14.325.000.000
		2.19.02.1.02.0003		Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda ****					200.000.000		275.000.000
						Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha ****	Orang	120	200.000.000	120	275.000.000
		2.19.02.1.02.0004		Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi ****					6.100.000.000		14.050.000.000
						Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan provinsi ****	Dokumen	3	6.100.000.000	5	14.050.000.000
	<b>Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>								<b>55.173.575.000</b>		<b>15.900.000.000</b>
						Nilai tambah ekonomi kreatif	Rupiah	1,686E+12		1,7E+12	
						Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	8,01		8,26	
	<b>Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai kabupaten/kota kreatif *</b>								<b>825.000.000</b>		<b>800.000.000</b>
							Kabupaten/Kota	1	825.000.000	1	800.000.000

		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL **						825.000.000		800.000.000
						Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kotakreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan) **	Kabupaten /Kota	6	825.000.000	8	800.000.000
		3.26.04.1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif ***					625.000.000		550.000.000
						Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang PMK3I ***	Kabupaten/ Kota	2	625.000.000	2	550.000.000
		3.26.04.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif ****				625.000.000		550.000.000
						Penyediaan Sarana Prasarana Prasarana KaTa Kreatif ****	Unit	10	625.000.000	10	550.000.000
		3.26.04.1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif ***					200.000.000		250.000.000
						Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi HKI ***	Orang	80	200.000.000	80	250.000.000
		3.26.04.1.02.0008			Perlindungan Hasil Kreativitas ****				200.000.000		250.000.000
						Dokumen Perlindungan Hasil kreativitas yang berupa kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif ****	Dokumen	80	200.000.000	80	250.000.000
									<b>54.348.575.000</b>		<b>15.100.000.000</b>
						Jumlah pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah *	Rupiah	14054297	54.348.575.000	1,5E+07	15.100.000.000
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA **						4.533.575.000		4.625.000.000
						Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan **	%	13,33	4.533.575.000	26,67	4.625.000.000
		3.26.02.1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi ***					1.200.000.000		1.525.000.000
						Daya Tarik Wisata yang dikembangkan ***	Lokasi	5	1.200.000.000	6	1.525.000.000
		3.26.02.1.01.0008			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi ****				1.200.000.000		1.525.000.000
						Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tahapan (perintisan, pembangunan, Pemantapan, Revitalisasi) ****	Lokasi	5	1.200.000.000	6	1.525.000.000
		3.26.02.1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi ***					2.833.575.000		2.000.000.000
						Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola ***	Lokasi	1	2.833.575.000	2	2.000.000.000
		3.26.02.1.02.0007			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata				2.308.575.000		1.000.000.000

					Provinsi ****						
						Kawasan Strategis Pariwisata Povinsiyang dikembangkan ****	Lokasi	100	2.308.575.000	2	1.000.000.000
		3.26.02.1.02.0009			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi ****				525.000.000		1.000.000.000
						Masyarakat Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Yang Diberdayakan ****	Orang	1	525.000.000	200	1.000.000.000
		3.26.02.1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***					500.000.000		1.100.000.000
						Usaha Pariwisata yang memiliki TDUP/NIB ***	Dokumen	100	500.000.000	110	1.100.000.000
		3.26.02.1.04.0010			Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi ****				-		700.000.000
						Pengelolaan Investasi Pariwisata ****	Laporan	0	-	1	700.000.000
		3.26.02.1.04.0013			Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata ****				500.000.000		400.000.000
						Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata ****	Unit	350	500.000.000	450	400.000.000
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA **						46.200.000.000		5.750.000.000
						Jumlah kunjungan wisatawan **	Orang	49985228	46.200.000.000	5,4E+07	5.750.000.000
		3.26.03.1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi ***					46.200.000.000		5.750.000.000
						Pengguna Media Sarpras Pemasaran Pariwisata ***	Orang	400000	45.400.000.000	450000	3.850.000.000
		3.26.03.1.01.0001			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri ****				44.300.000.000		1.400.000.000
						Dokumen hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri ****	Dokumen	2	44.300.000.000	2	1.400.000.000
		3.26.03.1.01.0006			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri ****				1.100.000.000		2.450.000.000
						Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri ****	Kegiatan	30	1.100.000.000	85	2.450.000.000
						Tujuan Pasar Wisata Potensial ***	Lokasi	3	800.000.000	3	1.900.000.000
		3.26.03.1.01.0005			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata ****				800.000.000		1.900.000.000

						Hasil Pelaksanaan Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri ****	Dokumen	6	800.000.000	8	1.900.000.000
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF **						3.615.000.000		4.725.000.000
						Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi **	%	48,98	3.615.000.000	33,87	4.725.000.000
		3.26.05.1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan ***					2.915.000.000		3.975.000.000
						Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan ***	Orang	550	2.915.000.000	831	3.975.000.000
		3.26.05.1.01.0008			Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif ****				300.000.000		400.000.000
						Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif ****	Laporan	1	300.000.000	1	400.000.000
		3.26.05.1.01.0014			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata ****				1.665.000.000		1.650.000.000
						orang yang mengikuti peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata ****	Orang	300	1.665.000.000	500	1.650.000.000
		3.26.05.1.01.0016			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNl ****				950.000.000		1.925.000.000
						SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang dikembangkan Kompetensinya ****	Orang	250	950.000.000	380	1.925.000.000
		3.26.05.1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif ***					700.000.000		750.000.000
						Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif yang di latih dan disertifikasi ***	Orang	240	700.000.000	240	750.000.000
		3.26.05.1.02.0001			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif ****				225.000.000		250.000.000
						Pelaku SDM Ekraf yang mengikuti pelatihan, bimtek dan pendampingan ****	Orang	80	225.000.000	80	250.000.000
		3.26.05.1.02.0003			Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif ****				475.000.000		500.000.000
						SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti sertifikasi kompetensi	Orang	160	475.000.000	160	500.000.000

						****							
<b>Meningkatkan Pembangunan Olahraga</b>												<b>201.798.000.000</b>	<b>137.450.000.000</b>
						Sport Development Index (SDI)	%	0,42			0,45		
	<b>Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional kejuaraan Multievent *</b>											<b>200.198.000.000</b>	<b>134.700.000.000</b>
						Peringkat nasional pada kejuaraan multievent *	Peringkat	4	200.198.000.000		3	134.700.000.000	
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYASAING KEOLAHRAGAAN **						200.198.000.000			134.700.000.000	
						Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPOP) yang berprestasi **	Orang	50	14.950.000.000		105	23.000.000.000	
		2.19.03.1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi ***								-	-
						Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan ***	Orang	50	-		105	-	-
		2.19.03.1.01.0004			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga ditingkat provinsi ****							-	-
						Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan ****	Orang	0	-		0	-	-
		2.19.03.1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga ***					750.000.000			2.500.000.000	
						Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi ***	Orang	150	750.000.000		190	2.500.000.000	
		2.19.03.1.02.0004			Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga ****				500.000.000			1.500.000.000	
						Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event ****	Orang	150	500.000.000		500	1.500.000.000	
		2.19.03.1.02.0006			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi ****				250.000.000			1.000.000.000	
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi ****	Dokumen	1	250.000.000		2	1.000.000.000	

		2.19.03.1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional ***				14.200.000.000		20.500.000.000	
						Peningkatan jumlah atlet dan pelatih berprestasi sesuai jenjang (Kelompok Umur) tingkat nasional ***	Orang		14.200.000.000	0	20.500.000.000
		2.19.03.1.03.0001			Seleksi Atlet Daerah ****			350.000.000		500.000.000	
						Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi ****	Orang	350	350.000.000	750	500.000.000
		2.19.03.1.03.0007			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) ****			13.850.000.000		20.000.000.000	
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) ****	Orang	275	13.850.000.000	295	20.000.000.000
							%	28,18	185.248.000.000	31,25	111.700.000.000
		2.19.03.1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi ***				200.000.000		300.000.000	
						Peningkatan jumlah medali yang diperoleh pada jenjang pendidikan ***	Unit	50	200.000.000	150	300.000.000
		2.19.03.1.01.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus ****			200.000.000		300.000.000	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus ****	Dokumen	1	200.000.000	1	300.000.000
		2.19.03.1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga ***				59.163.000.000		30.100.000.000	
						Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi ***	Orang	500	59.163.000.000	250	30.100.000.000
		2.19.03.1.02.0004			Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga ****			1.500.000.000		16.000.000.000	

					Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event ****	Orang	1	1.500.000.000	3	13.000.000.000
					Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event ****	Orang	150	-	180	3.000.000.000
		2.19.03.1.02.0005			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi ****			350.000.000		600.000.000
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi ****	Dokumen	1	350.000.000	1	600.000.000
		2.19.03.1.02.0006			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi ****			57.313.000.000		13.500.000.000
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi ****	Dokumen	14	57.313.000.000	23	13.500.000.000
		2.19.03.1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional ***				125.885.000.000		81.300.000.000
					Peningkatan jumlah atlet berprestasi sesuai jenjang tingkat nasional ***	Orang	120	125.885.000.000	125	81.300.000.000
		2.19.03.1.03.0006			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga ****			1.525.000.000		15.000.000.000
					Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan ****	Orang	30	1.525.000.000	200	15.000.000.000
		2.19.03.1.03.0007			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) ****			1.350.000.000		2.900.000.000
					Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) ****	Orang	6000	1.000.000.000	7000	2.000.000.000

					Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) ****	Orang	125	350.000.000	200	900.000.000
		2.19.03.1.03.0008			Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi ****			250.000.000		400.000.000
					Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan ****	Dokumen	1	250.000.000	1	400.000.000
		2.19.03.1.03.0009			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi ****			122.760.000.000		63.000.000.000
					Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan ****	Orang	700	122.760.000.000	700	63.000.000.000
	<b>Meningkatnya Tingkat kebugaran masyarakat *</b>							<b>1.600.000.000</b>		<b>2.750.000.000</b>
					Persentase tingkat kebugaran masyarakat *	%	0,183	1.600.000.000	0,202	2.750.000.000
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYASAING KEOLAHRAGAAN **					1.600.000.000		2.750.000.000
					Jumlah masyarakat yang buger **	Orang	750	1.600.000.000	1050	2.750.000.000
		2.19.03.1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga ***				1.600.000.000		2.750.000.000
					Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan ***	Unit	2	1.600.000.000	3	2.750.000.000
		2.19.03.1.04.0003			Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait ****			150.000.000		250.000.000
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan ****	Dokumen	1	150.000.000	1	250.000.000
		2.19.03.1.04.0005			Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi ****			1.450.000.000		2.500.000.000
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan ****	Dokumen	4	1.450.000.000	6	2.500.000.000
<b>Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah</b>								<b>45.699.253.000</b>		<b>50.232.917.000</b>
					Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	79,31		80,41	
	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah *</b>							<b>44.937.004.000</b>		<b>48.882.917.000</b>
					Indeks Kepuasan Masyarakat *	Angka	75	44.937.004.000	79	48.882.917.000
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **					44.937.004.000		48.882.917.000
						%	100	40.111.404.000	100	42.577.000.000

		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ***						27.606.528.000		26.450.000.000
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Dokumen	1		27.606.528.000	1	26.450.000.000
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ****					26.578.568.000		25.500.000.000
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN ****	Orang	170		26.578.568.000	170	25.500.000.000
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****					1.027.960.000		950.000.000
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN ****	Dokumen	1		1.027.960.000	1	950.000.000
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ***						300.000.000		400.000.000
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***	Dokumen	1		300.000.000	1	400.000.000
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****					300.000.000		400.000.000
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1		300.000.000	1	400.000.000
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***						180.480.000		220.000.000
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ***	%	100		180.480.000	100	220.000.000
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ****					90.480.000		-
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan ****	Paket	156		90.480.000	0	-
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai ****					-		40.000.000
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai ****	Dokumen	0		-	1	40.000.000
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ****					30.000.000		50.000.000
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ****	Orang	30		30.000.000	50	50.000.000
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ****					30.000.000		30.000.000
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan ****	Orang	50		30.000.000	100	30.000.000
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					30.000.000		100.000.000

					****							
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ****	Orang	30	30.000.000	50	100.000.000	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					1.515.000.000		2.457.000.000	
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	1.515.000.000	100	2.457.000.000	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				50.000.000		100.000.000	
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan ****	Paket	1	50.000.000	1	100.000.000	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				60.000.000		150.000.000	
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	1	60.000.000	1	150.000.000	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				-		150.000.000	
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	0	-	1	150.000.000	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****				150.000.000		150.000.000	
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	1	150.000.000	1	150.000.000	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****				75.000.000		100.000.000	
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	1	75.000.000	1	100.000.000	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****				5.000.000		12.000.000	
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	1	5.000.000	1	12.000.000	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu ****				175.000.000		200.000.000	
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	1	175.000.000	1	200.000.000	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				1.000.000.000		1.500.000.000	
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	1	1.000.000.000	1	1.500.000.000	

		X.XX.01.1.06.001 0			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****				-		20.000.000
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	-	1	20.000.000
		X.XX.01.1.06.001 1			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ****				-		75.000.000
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ****	Dokumen	1	-	1	75.000.000
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***					-		950.000.000
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***	Unit	1	-	1	950.000.000
		X.XX.01.1.07.000 1			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ****				-		-
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan ****	Unit	0	-	0	-
		X.XX.01.1.07.000 2			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****				-		-
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan ****	Unit	0	-	0	-
		X.XX.01.1.07.000 6			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				-		-
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan ****	Unit	0	-	0	-
		X.XX.01.1.07.000 7			Pengadaan Aset Tetap Lainnya ****				-		200.000.000
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan ****	Unit	0	-	1	200.000.000
		X.XX.01.1.07.001 1			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				-		750.000.000
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit	0	-	1	750.000.000
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					9.702.040.000		10.870.000.000
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	1	9.702.040.000	1	10.870.000.000
		X.XX.01.1.08.000 1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				10.000.000		20.000.000

						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	12	10.000.000	12	20.000.000
		X.XX.01.1.08.000 2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				1.250.000.000		2.200.000.000
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	12	1.250.000.000	12	2.200.000.000
		X.XX.01.1.08.000 3			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				120.000.000		150.000.000
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Laporan	12	120.000.000	12	150.000.000
		X.XX.01.1.08.000 4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				8.322.040.000		8.500.000.000
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	12	8.322.040.000	12	8.500.000.000
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					807.356.000		1.230.000.000
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	1	807.356.000	1	1.230.000.000
		X.XX.01.1.09.000 1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ****				75.000.000		100.000.000
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ****	Unit	12	75.000.000	12	100.000.000
		X.XX.01.1.09.000 2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****				200.000.000		200.000.000
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit	12	200.000.000	12	200.000.000
		X.XX.01.1.09.000 5			Pemeliharaan Mebel ****				-		30.000.000
						Jumlah mebel yang dipelihara ****	Unit	0	-	12	30.000.000
		X.XX.01.1.09.000 6			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				150.000.000		150.000.000
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit	12	150.000.000	12	150.000.000
		X.XX.01.1.09.000 7			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya ****				80.000.000		100.000.000
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara ****	Unit	12	80.000.000	12	100.000.000
		X.XX.01.1.09.000 9			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan				302.356.000		300.000.000

					Lainnya ****							
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	12	302.356.000	12	300.000.000	
		X.XX.01.1.09.001 0			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				-		200.000.000	
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	0	-	12	200.000.000	
		X.XX.01.1.09.001 1			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				-		150.000.000	
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	0	-	12	150.000.000	
							%		4.825.600.000	0	6.305.917.000	
		X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ***				125.000.000		150.000.000	
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***	Dokumen		125.000.000	0	150.000.000	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****				125.000.000		150.000.000	
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	125.000.000	1	150.000.000	
		X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah ***				177.000.000		170.000.000	
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%		177.000.000	0	170.000.000	
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				30.000.000		30.000.000	
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	
		X.XX.01.1.06.000 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				30.000.000		30.000.000	
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	
		X.XX.01.1.06.000 3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				3.000.000		4.000.000	
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	3.000.000	1	4.000.000	

		X.XX.01.1.06.000 5			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan ****				6.000.000		6.000.000
						Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan ****	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000
		X.XX.01.1.06.000 6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****				10.000.000		10.000.000
						jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan ****	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000
		X.XX.01.1.06.000 8			Fasilitasi Kunjungan Tamu ****				13.000.000		15.000.000
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	1	13.000.000	1	15.000.000
		X.XX.01.1.06.000 9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				85.000.000		75.000.000
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	1	85.000.000	1	75.000.000
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***					-		521.997.000
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***	Unit		-	0	521.997.000
		X.XX.01.1.07.000 6			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				-		125.000.000
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ****	Unit	0	-	4	125.000.000
		X.XX.01.1.07.000 7			Pengadaan Aset Tetap Lainnya ****				-		196.997.000
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan ****	Unit	1	-	5	196.997.000
		X.XX.01.1.07.001 0			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit	0		0	-
		X.XX.01.1.07.001 1			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				-		200.000.000
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit	0	-	3	200.000.000
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.298.600.000		4.283.920.000

				***								
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan		3.298.600.000	0	4.283.920.000	
		X.XX.01.1.08.000 1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				10.000.000		20.000.000	
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	1	10.000.000	1	20.000.000	
		X.XX.01.1.08.000 2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				2.100.000.000		2.845.920.000	
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	1	2.100.000.000	1	2.845.920.000	
		X.XX.01.1.08.000 3			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				50.000.000		50.000.000	
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	
		X.XX.01.1.08.000 4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				1.138.600.000		1.368.000.000	
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	1	1.138.600.000	1	1.368.000.000	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					1.225.000.000		1.180.000.000	
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit		1.225.000.000	0	1.180.000.000	
		X.XX.01.1.09.000 5			Pemeliharaan Mebel ****				-		30.000.000	
						Jumlah mebel yang dipelihara ****	Unit	0	-	1	30.000.000	
		X.XX.01.1.09.000 6			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				100.000.000		150.000.000	

					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit	1	100.000.000	2	150.000.000
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya ****					
					Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara ****	Unit			0	-
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****			1.125.000.000		1.000.000.000
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	1.125.000.000	1	1.000.000.000
	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah *</b>							<b>762.249.000</b>		<b>1.350.000.000</b>
					Indeks Manajemen Risiko *	Angka	3,01	762.249.000	3,02	1.350.000.000
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **					762.249.000		1.350.000.000
					Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah **	%	100	762.249.000	100	1.350.000.000
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ***				762.249.000		1.350.000.000
					Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ***	%	100	762.249.000	100	1.350.000.000
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ****			500.000.000		900.000.000
					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah ****	Dokumen	5	500.000.000	5	900.000.000
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****			262.249.000		450.000.000
					Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah ****	Laporan	2	262.249.000	2	450.000.000

## 4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindakan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah	Pelayanan Perangkat Daerah Tidak Maksimal	9	Kurangnya Peningkatan Kapasitas Sdm	Tidak Optimalnya Pelayanan Perangkat Daerah	Pelatihan Dan Bimbingan Teknis	Dispora par Jateng	Tw IV
	Persentase Tingkat Ketercapaian Kinerja Perangkat Daerah	Mendapatkan Nilai Yang Kurang Baik Saat Evaluasi Kinerja	9	Tidak Terorganisirnya Pelaksanaan Kegiatan	Kinerja Tidak Tercapai	Koordinasi Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dispora par Jateng	Tw IV
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Tidak terselenggaranya kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan	9	Tidak Optimalnya Perencanaan, perubahan teknis secara mendadak	Mendapatkan catatan evaluasi	Mendapatkan catatan evaluasi	Koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan dengan bidang /balai teknis terkait	Tw II
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	Ketidaksesuaian dalam penyajian laporan keuangan	6	Audit Internal belum berjalan secara optimal	Menjadi catatan pemeriksa	Menjadi catatan pemeriksa	Evaluasi penyajian laporan keuangan	Tw III
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rusaknya peralatan penunjang perangkat daerah	6	Perawatan barang yang kurang optimal	Tidak optimalnya pelaksanaan pelayanan perangkat daerah	Tidak optimalnya pelaksanaan pelayanan perangkat daerah	Inventarisir barang milik perangkat daerah	Tw III
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai dengan	Kesalahan administrasi kepegawaian perangkat daerah	6	Kurangnya optimalnya pelayanan kepegawaian	Pelayanan Perangkat Daerah tidak optimal	Pelayanan Perangkat Daerah tidak optimal	Evaluasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tw III

	Standar Layanan							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Standar Layanan	Tidak optimalnya pelayanan perangkat daerah	6	Tidak terpenuhinya standar pelayanan PD	Nilai Kepuasan Masyarakat Rendah	Nilai Kepuasan Masyarakat Rendah	Evaluasi pelayanan perangkat daerah	Tw III
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	Rusaknya barang penunjang perangkat daerah	9	Barang yang ada tidak sesuai spesifikasi	tidak optimalnya pelayanan perangkat daerah	tidak optimalnya pelayanan perangkat daerah	Pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme yang berlaku	Tw III
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun	Mendapatkan komplain terkait penyediaan jasa penunjang	6	tidak optimalnya perencanaan	Tidak optimalnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tidak optimalnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Evaluasi Pelayanan publik secara berkala	Tw III
Pemeliharaan Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Pemeliharaan	Rusaknya barang penunjang perangkat daerah	6	Kurangnya pemeliharaan	Pelayanan perangkat daerah terganggu	Pelayanan perangkat daerah terganggu	Monitoring berkala	Tw III
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Wirausaha Muda Mandiri	Kurangnya Kualitas Dan Daya Saing Pemuda Dalam Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Ekonomi	12	1. Semakin Berkembangnya Kebutuhan Pasar 2. Kurangnya Inovasi Wirausaha Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemuda 3. Kurangnya Ilmu Dan Keterampilan Yang Dimiliki Pemuda 4. Minimnya Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Pemuda Untuk Mengembangkan Wirausaha 5. Minimnya	1. Menurunnya Kepercayaan Diri Pemuda Untuk Memulai Wirausaha 2. Ide Inovasi Yang Dimiliki Pemuda Tidak Dapat Dijalankan 3. Kurang Berkembangnya Pemuda	1. Sudah Ada Kebijakan Pergub Tentang Kewirausahaan 2. Sudah Ada Pelatihan Kewirausahaan Untuk Memberikan Ilmu Dan Bekal Kepada Pemuda 3. Sudah Ada Penerjunan Pemuda Potensial Ke Desa Untuk Mengembangkan Kemandirian Pemuda	Disparpar Jateng	Tw III

				Fasilitas Untuk Pemuda Agar Dapat Mengembangkan Wirausaha 6. Kurangnya Modal Yang Dimiliki Pemuda Untuk Memulai Usaha	Dalam Sektor Ekonomi 4. Kurangnya Minat Dari Pemuda Untuk Berwirausaha 5. Kurangnya Lapangan Pekerjaan Yang Akan Tercipta 6. Kurangnya Wirausaha Sukses Di Usia Pemuda	Dalam Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Ekonomi Pemuda		
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Jumlah Lokus Unggulan Hasil Pendampingan Kepeloporan Pemuda	Kurang Berkembangnya Pemuda Peserta Program PKKPD di Desa Penempatan	12	1. Kurangnya modal awal yang dimiliki Peserta 2. Kurangnya kemampuan membangun kepercayaan dari masyarakat 3. Kurangnya keterbukaan dari masyarakat untuk berinovasi 4. Kurangnya sarana dan prasarana di Desa Penempatan untuk mengembangkan diri 5. Waktu yang dirasa masih kurang sehingga tidak bisa mendalami dan mengembangkan potensi desa 6. Semakin minimnya jumlah pemuda di desa	1. Desa sulit untuk dilembangkan potensinya 2. Jumlah pemuda di desa semakin berkurang karena minimnya lapangan pekerjaan 3. Tidak adanya inovasi baru dalam pengembangan desa 4. Produktivitas ekonomi di desa menjadi rendah	1. meningkatkan daya saing pemuda Jawa Tengah melalui kegiatan sosialisasi/pelatihan 2. bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan stakeholder terkait	Dispora par Jateng	Tw III
		Jumlah pemuda kader provinsi dari seluruh kab/kota yang ditingkatkan	12	kurangnya penyadaran dan daya saing pemuda di era globalisasi	1. kurang bersaingnya pemuda di era globalisasi 2.	1. meningkatkan daya saing pemuda Jawa Tengah melalui kegiatan sosialisasi/pel	Dispora par Jateng	Tw IV

		kapasitas daya saingnya			terkikisnya jiwa Nasionalisme 3. berkurangnya jiwa kepeloporan para pemuda	atihan 2. bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan stakeholder terkait		
	Jumlah wirausaha muda	Kurangnya Minat Pemuda untuk Berwirausaha dalam Upaya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi	12	1. Kurangnya modal untuk memulai berwirausaha 2. Kurangnya minat pemuda untuk memulai berwirausaha 3. Kurangnya sarana dan prasarana Pemuda untuk memulai wirausaha 4. Kurangnya fasilitas Pemuda untuk memulai wirausaha 5. Kurangnya ilmu dan kemampuan Pemuda dalam manajemen wirausaha 6. Kurangnya mentor bagi Pemuda untuk memulai wirausaha	1. Kurangnya kepercayaan diri Pemuda untuk memulai berwirausaha 2. Kurangnya inovasi wirausaha dari Pemuda 3. Kurangnya jumlah wirausaha dari Pemuda 4. Kurangnya lapangan pekerjaan baru	1. Pergub Tentang Kewirausahaan 2. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda 3. Penerjuman Pemuda Potensial Ke Desa	Dispora par Jateng	Tw III
	Tersedianya data capaian IPP domain Pendidikan ; Kesehatan dan kesejahteraan; gender dan diskriminasi	penurunan moral dan pengetahuan pendidikan kesehatan	25	kurangnya pemahaman pemuda terhadap nilai-nilai luhur pancasila dan pengetahuan pendidikan kesehatan	menurunnya moralitas para pemuda terhadap kehidupan bermasyarakat dan kurangnya pengetahuan terhadap pendidikan kesehatan	Sudah Ada Sosialisasi Dan Pendampingan Pemuda Terkait Dengan Peningkatan Moralitas Dan Pengetahuan Pendidikan Kesehatan	Dispora par Jateng	Tw IV
	Jumlah Pemuda Aktif Dalam Berorganisasi	Rendahnya Kesadaran Pemuda Untuk Partisipasi Dalam Organisasi Kepemudaan	6	Kurangnya Sosialisasi Dan Pendampingan Pemuda Dalam Membangkitkan Kesadaran Untuk Pemuda Dalam Berpartisipasi	Kepesertaan Pemuda Dalam Organisasi Rendah	Peningkatan kegiatan kepemudaan	Dispora par Jateng	Tw IV
		Pemuda	20	Kurangnya	Kemandi	Sudah Ada	Dispora	Tw

		Enggan Untuk Berpartisipasi Dalam Organisasi Kepemudaa n		Sosialisasi Dan Pendampingan Pemuda	rian Dan Karakter Pemuda Berkuran g	Sosialissi Dan Pendampingan Pemuda Terkait Dengan Kemandirian Dan Pembentukan Karakter Pemuda	par Jateng	IV
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaa n Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaa n provinsi	kegiatan pemuda tidak terorganisir	25	kurangnya pemahaman pemuda untuk berorganisasi	tidak adanya organisasi kepemudaa n	Sudah Adanya Pelatihan Kaderisasi Dan Organisasi Kepemudaa n	Dispora par Jateng	Tw III
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	Persentase Peningkatan Perolehan Medali	Tidak tercapainya target perolehan medali	9	atlet-atlet yang berpotensi pindah ke daerah lain	perolehan medali tidak naik atau bahkan bisa jadi turun sebab perpindahan atlet-atlet berpotensi tersebut	peningkatan pembinaan atlet berpotensi yang terprogram dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga diharapkan mengurangi perpindahan atlet ke daerah lain.	Dispora par Jateng	Tw IV
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Peningkatan Jumlah Peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi	Tidak terselenggaranya kejuaraan/kompetisi	9	Minimnya alokasi dana yang dianggarkan untuk penyelenggaraan kejuaraan atau keikutsertaan /partisipasi dalam kejuaraan olahraga	Beberapa pertandingan tidak terselenggara dengan baik dari segi teknis pertandingan dan yang lainnya.	komunikasi dengan pihak terkait (pengprov, koni, dll)	Dispora par Jateng	Tw IV
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Peningkatan Jumlah atlet berprestasi sesuai jenjang tingkat nasional	Kurang optimalnya penyediaan data dan informasi keolahragaa n di Jawa Tengah	6	Data tidak di update secara berkala, Keterbatasan SDM yang berkompetensi di daerah	Penyediaan data keolahragaan tidak tersaji dengan baik sehingga masyarakat	informasi data keolahragaan baik di daerah maupun di tingkat Provinsi harus di update	Dispora par Jateng	Tw III

					kat atau stakeholder tidak mendapatkan informasi keolahraagaan secara menyeluruh. Menurutnya daya saing keolahraagaan di Jawa Tengah.	secara berkala, melaksanakan bintek alikasi SIMPORA setiap kali terdapat pengembangan sistem dan melaksanakan Rakor Data Keolahraagaan dengan daerah dan stakeholder		
Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan	Prestasi di tingkat olahraga pendidikan menurun	9	Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga Masih minimnya jumlah kompetisi/kejuaraan olahraga di Provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat olahraga pendidikan menurun dari tahun sebelumnya	Peningkatan pembinaan olahraga di tingkat pelajar Fasilitasi sarpras olahraga yang memadai	Dispora par Jateng	Tw IV
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	Jumlah Masyarakat Yang Bugar	Turunnya Tingkat Kebugaran Masyarakat	6	Masih Rendahnya Budaya	Turunnya Persentase Masyarakat	Optimalisasi Kegiatan Olahraga Kemasyarakatan	Dispora par Jateng	Tw IV
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Kawasan Pariwisata Yang Dikembangkan	Pengembangan Kawasan Pariwisata Tidak Disertai Dengan Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya	6	Perencanaan Lintas Sektoral Pada Pengembangan Kawasan Pariwisata Dari Segi Aksesibilitas, Atraksi, Amenitas, Aktivitas, Akomodasi, Dan Ancillary Kurang Terkoordinasi	Hasil Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Tidak Dapat Dimanfaatkan Secara Optimal	Koordinasi Dengan OPD Terkait Yang Dapat Mendukung Pengembangan Pendukung Pengembangan Kawasan Pariwisata	Dispora par Jateng	Tw IV
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Daya Tarik Wisata di Jawa Tengah yang tidak berdaya saing	1	Kurangnya inovasi atraksi wisata sesuai kebutuhan dan permintaan wisatawan	Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan di DTW	Melakukan Koordinasi Lintas Sektoral Untuk Menentukan Arah Kebijakan Sebagai	Dispora par Jateng	Tw III

Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dan Provinsi	Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	Pengembangan Aset Pariwisata Milik Provinsi Jawa Tengah	10	Penyedia tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Kontruksi untuk PPKom sesuai dengan ketentuan Kontrak	Tidak tercapainya progres fisik sesuai kesepakatan kontrak, dikarenakan pihak kontraktor tidak memiliki manajemen keuangan internal yang baik atau tidak memiliki cukup modal untuk melaksanakan pekerjaan, (walaupun sudah mencairkan uang muka dan termin pembayaran) sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi terhambat	Tindaklanjut Dalam Proses Penetapan Pemenang Ppkom Dibantu PPTK Harus Jeli Dan Cermat Dalam Mengecek Track Record Dan Keabsahan Kandidat Penyedia Jasa. Selalu Berkoordinasi Dengan Konsultan Pengawas Dan Kontraktor Untuk Melakukan Pengecekan Berkala Terhadap Progres Pekerjaan, Diadakan Rapat Progres Secara Rutin, Bahkan Apabila Perlu Jika Ditemukan Indikasi Penyelewengan Diterbitkan Surat Peringatan.	Dispora par Jateng	Tw II
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Usaha Pariwisata yang memiliki TDUP/NIB	Rendahnya9 pemenuhan standarisasi dan legalitas usaha pariwisata di Jawa Tengah	4	- Kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha pariwisata terkait standarisasi dan perizinan usaha pariwisata - Kurangnya pelaku usaha pariwisata terkait standarisasi dan perizinan usaha pariwisata	Menurunnya 99kunjungan wisatawan dan terganggunya operasional usaha pariwisata karena belum terpenuhinya legalitas usahanya.	- Pembinaan Usaha Pariwisata - Pengawasan Usaha Pariwisata Di Daerah - Terinventarisasi Nya 13 Usaha Pariwisata	Dispora par Jateng	Tw IV
PROGRAM PEMASARAN	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Menurunnya Perjalanan Dan Lama	6	Kurangnya Dukungan Kepada Rendahnya	Berkurangnya Pengeluaran	Optimalisasi Promosi Pariwisata Melalui Media	Dispora par Jateng	Tw IV

PARIWISATA		Tinggal Wisatawan Di Jawa Tengah		Melalui Adaptasi Teknologi Digital, Strategi Pemasaran Bersama, Dan Transisi Ke Arah Pariwisata Berkelanjutan	Konsumsi Wisatawan	Digital		
		Menurunnya Jumlah Pengguna Sarpras Pemasaran Pariwisata	6	Kurangnya jenis media informasi pemasaran pariwisata yang digunakan dan materi / konten informasi pemasaran pariwisata yang kurang menarik	Menurunnya Traffic Pengguna Media Yang Dikelola Oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah	Mendorong Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota Untuk Mengirimkan Konten Terkait Pariwisata Di Wilayah, Mengadakan Lomba Foto Dan Lomba Video Untuk Meningkatkan Kualitas Konten Promosi Pariwisata	Disporapar Jateng	Tw IV
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengguna Media Sarpras Pemasaran Pariwisata	Menurunnya jumlah pengguna sarpras pemasaran pariwisata	6	Kurangnya jenis media informasi pemasaran pariwisata yang digunakan dan materi / konten informasi pemasaran pariwisata yang kurang menarik	Menurunnya traffic pengguna media yang dikelola oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah	Mendorong Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota Untuk Mengirim Konten Terkait Pariwisata Di Wilayah, Mengadakan Lomba Foto Dan Lomba Video Untuk Meningkatkan Kualitas Konten Promosi Pariwisata	Disporapar Jateng	Tw IV
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Kurang Optimalnya Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri	6	1. Terbatasnya Jumlah Sdm Pengelola Pendataan Di Daerah; 2. Terlambatnya Pelaporan Data Tiap Bulannya; 3. Luasnya Cakupan Lokus Pendataan; 4. Target Pasar Potensial Jawa Tengah Belum Optimal Dilakukan ; 5. Terbatasnya Penentuan Peserta	1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Sebagai Bahan Penyusunan Kebijakan; 2. Menurunnya Daya Saing Pariwisata Jawa Tengah	1. Melakukan Pengembangan Aplikasi Sisdaporapar Agar End-Usernya Bisa Sampai Ke Pengelola DTW Untuk Melakukan Penginputan Jumlah Kunjungan Wisatawan; 2. Rapat Koordinasi Per Tri Wulan; 3. Melakukan Koordinasi Permohonan	Disporapar Jateng	Tw IV

				Famtrip.		Peserta Famtrip Dengan Dinas Pariwisata Di Luar Provinsi Jawa Tengah.		
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tujuan Pasar Wisata Potensial	Kurang optimalnya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri	6	1. Terbatasnya jumlah SDM pengelola pendataan di daerah; 2. Terlambatnya pelaporan data tiap bulannya; 3. Luasnya cakupan lokus pendataan; 4. Target pasar potensial Jawa Tengah belum optimal dilakukan ; 5. Terbatasnya penentuan peserta famtrip .	1. Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai bahan penyusunan kebijakan ; 2. Menurunnya daya saing pariwisata Jawa Tengah.	1. Melakukan Pengembangan Aplikasi Sisdaporapar Agar End-Usernya Bisa Sampai Ke Pengelola DTW Untuk Melakukan Penginputan Jumlah Kunjungan Wisatawan; 2. Rapat Koordinasi Per Tri Wulan; 3. Melakukan Koordinasi Permohonan Peserta Famtrip Dengan Dinas Pariwisata Di Luar Provinsi Jawa Tengah.	Dispora par Jateng	Tw IV
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Menurunnya Kualitas Promosi Pariwisata	6	Kurangnya Kualitas Promosi Dan Informasi Pariwisata	Menurunnya Minat Kunjungan Wisatawan Ke Jawa Tengah	Mengembangkan Promosi Pariwisata Melalui Media Sosial	Dispora par Jateng	Tw IV
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Kabupaten /Kota Yang Terfasilitasi Sarana Prasarana Kota Kreatif Yang Teruji Petik (Kabupaten /Kota Layanan)	Kab/Kota (Kata) Kreatif Yang Uji Petik Pmk3i Tidak Sesuai Target Waktu Yang Di Tentukan	6	Kurangnya Pemerataan Pemahaman Pelaku Usaha Parekraf Dalam Kesempatan Memperoleh Manfaat Serta Mempersiapkan Sdm Pada Sub Sektor Ekonomi Kreatif (Khususnya Kriya, Kuliner Dan Fashion) Dalam Pengisian Borang, Ujipetik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif.	Pengajuan Tidak Dapat Diproses Oleh Kemenparekraf	Memetakan Dan Mengidentifikasi Potensi Untuk Menetapkan Subsektor Ekraf Yang Bisa Menjadi Unggulan Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Pmk3i)		Tw III
Penyediaan Sarana	Kab/Kota (KaTa)	Kab/Kota (KaTa)	6	Kurangnya pemerataan	Proses Pengisian	Evaluasi Pengisian dan	Dispora par	Tw II

dan Prasarana Kota Kreatif	Kreatif yang PMK3I	Kreatif yang uji petik PMK3I tidak sesuai target waktu yang di tentukan		Pemahaman pelaku usaha parekraf dalam kesempatan memperoleh manfaat serta mempersiapkan SDM pada Sub Sektor Ekonomi Kreatif (Khususnya Kriya, Kuliner dan Fashion) dalam pengisian borang, ujipetik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif.	dan pengajuan Uji petik Kab/Kota (KaTa) Kreatif menjadi lebih lama dan tidak sesuai dengan harapan (waktu tidak sesuai target)	pengajuan Uji petik Kab/Kota (KaTa) Kreatif	Jateng	
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi HKI	Kurang meratanya kesempatan bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memperoleh fasilitas Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual	6	Keterbatasan anggaran untuk kegiatan tersebut	Kurang maksimalnya pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah yang tersertifikasi Hak Kekayaan Intelektual	Pemerataan Kuota Peserta Fasilitasi Sertifikasi HKI Tiap Kab/Kota	Dispora par Jateng	Tw III
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Dan Sdm Pariwisata Yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Kurangnya Mengimplementasikan Adaptasi, Inovasi, Dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dan Pelaku Parekrafkraf	6	Rendahnya Komitmen Untuk Mendukung Penguatan Ekosistem Sektor Parekraf Melalui Pendekatan Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Parekraf Dalam Pembangunan Yang Berpusat Pada Masyarakat.	Tidak Meratanya Sdm Parekraf Yang Sudah Tersertifikasi	Penguatan Pengembangan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Melalui Sertifikasi	Dispora par Jateng	Tw III
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat	Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Kurangnya Mengimplementasikan Adaptasi, Inovasi, Kolaborasi Pemangku Kepentingan dan Pelaku Pariwisata	6	Rendahnya Komitmen untuk mendukung Penguatan Ekosistem Sektor Pariwisata melalui pendekatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya	Tidak Meratanya SDM Pariwisata yang sudah tersertifikasi	Penguatan Pengembangan SDM Pariwisata Melalui Pembekalan Dan Sertifikasi	Dispora par Jateng	Tw III

Lanjutan				manusia (SDM) Pariwisata dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat.				
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif yang di latih dan disertifikasi	Kurang meratanya kesempatan bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memperoleh fasilitasi pelatihan ekonomi kreatif dan sertifikasi kompetensi	6	Keterbatasan anggaran untuk kegiatan tersebut	Kurang maksimalnya pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah yang terlatih dan tersertifikasi kompetensi	Pemerataan Kuota Peserta Pelatihan Dan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Tiap Kab/Kota	Dispora par Jateng	Tw IV
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	Kurangnya mengimple mentasikan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi pemangku kepentingan dan Pelaku Parekrafkraf	6	Rendahnya komitmen untuk mendukung penguatan ekosistem sektor parekraf Melalui pendekatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Parekraf dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat.	Tidak Meratanya SDM Parekraf yang sudah tersertifikasi	Penguatan pengembangan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif melalui sertifikasi	Dispora par Jateng	Tw IV
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	Jumlah Atlet Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (Pplop) Yang Berprestasi	Pembinaan Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (Pplop) Berprestasi Harus Ditingkatkan	9	Pembinaan Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (Pplop) Mempunyai Potensi Besar Dalam Mencetak Atlet Nasional	Dalam Pelaksanaan Pembinaan Atlet Prestasi Membutuhkan Fasilitas Dan Pengalaman Dalam Bertanding Yang Cukup, Kebutuhan Dalam Program Uji Tanding Dan Pengiriman Kejuaraan Dibutuhkan Untuk Dapat Mengeval	1. Memenuhi Kebutuhan Gizi Atlet 2. Melakukan Progam Uji Tanding 3. Mengikuti Kejuaraan Tingkat Nasional	Dispora par Jateng	Tw IV

					uasi Hasil Pelatihan Dalam Pembinaan			
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi	Berkurangnya peserta yang berpartisipasi dalam Kejuaraan	6	1. Minimnya alokasi anggaran untuk Pengiriman Kejuaraan 2. Jadwal event kejuaraan yang belum pasti	Berkurangnya jumlah peserta yang berpartisipasi dalam Kejuaraan	1. Peningkatan Anggaran Untuk Pengiriman Kejuaraan 2. Berkoordinasi Dengan Kementerian Pemuda Dan Olahraga	Dispora par Jateng	Tw II
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Peningkatan jumlah atlet dan pelatih berprestasi sesuai jenjang (Kelompok Umur) tingkat nasional	1. Atlet yang tidak mengikuti Pembinaan 2. atlet dan pelatih yang tidak berprestasi	16	1. Pembinaan Atlet yang kurang optimal 2. Kurangnya ketersediaan perlengkapan dan Sarana prasarana untuk Atlet Pelatih 3. Kurang Optimal Progam Pelatihan untuk Pelatih	Berkurangnya jumlah atlet dan pelatih milik daerah	1. Melakukan Efektifitas Pembinaan Atlet Dan Bekerjasama Dengan Stakeholder Terkait 2. Penambahan Perlengkapan Dan Sarana Prasarana Untuk Atlet 3. Bekerjasama Dengan Analisis Olahraga Dalam Perancangan Progam Latihan	Dispora par Jateng	Tw IV
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah	Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah Masih Harus Ditingkatkan	9	Keterbatasan Kualitas Dan Kuantitas Sdm Pada Balai Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Kurang Cepat Penyelesaiannya, Dari Sisi Kepegawaian Masih Harus Ditingkatkan Pengelolaan Data Kepegawaian. Dari Sisi Administrasi Keuangan Penyelesaian	1. Berkoordinasi Dengan Pihak Terkait 2. Memotivasi Kepedulian Pegawai Terkait Pengelolaan Data Kepegawaian Yang Lebih Baik 3. Melakukan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Supaya Tidak Terjadi Keterlambatan 4. Memberdayakan Tenaga Non ASN	Dispora par Jateng	Tw III

					Administ rasi Keuanga n Mengala mi Keterlam batan			
Administ rasi Barang Milik Daerah pada Perangka t Daerah	Jumlah jenis dokumen administra si barang milik daerah pada perangkat daerah	Proses klaim Asuransi sulit dilakukan	9	Data dukung Klaim Asuransi tidak lengkap	Klaim Asuransi tidak dapat dilakuka n	Dibentuk SK Kepala Dinas Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	Dispora par Jateng	Tw III
Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Persentase layanan administra si umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Belanja Administras i umum Perangkat Daerah yang dibutuhkan masih lebih banyak dari yang tersedia	9	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administ rasi umum yang tersedia terbatas	Memaksimalk an Pemanfaatan Anggaran Yang Tersedia Serta Melakukan Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaanny a	Dispora par Jateng	Tw II
Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Yang Dibutuhkan Masih Lebih Banyak Dari Yang Tersedia	9	Barang Milik Daerah yang ada saat ini sudah belum dapat memenuhi kebutuhan atlet, pelatih dan masyarakat pengguna sarana prasarana olahraga di kawasan olahraga jatidiri	Kurang efektif dan efisien dalam pemenuh an kebutuha n atlet, pelatih dan masyarak at pengguna kawasan olahraga jatidiri	Optimalisasi Penggunaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Sudah Ada	Dispora par Jateng	Tw I
Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah yang disusun	Penyediaan tidak tepat waktu	6	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyedia an terlamba t	Dibentuk SK Kepala Dinas Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	Dispora par Jateng	Tw I
Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah an daerah yang dilakukan pemelihara an	Meningkatn ya Kerusakan Barang Milik Daerah dan Kerusakan Barang Milik Daerah terjadi secara bersamaan	9	Keterbatasan Anggaran dan Barang Milik Daerah yang biaya pemeliharaann ya sangat mahal	Dengan kurang maksimal nya fungsi barang milik daerah mengaki batkan pelayana n umum dan	Melakukan Skala Prioritas Dalam Melakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dispora par Jateng	Tw III

					masyarak at kurang maksimal dan tergangg u			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan tahapan tahun kedua dalam pencapaian Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026. Rencana Kerja (Renja) Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah rancangan penyelenggaraan program/kegiatan untuk tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 serta selaras dengan dokumen perencanaan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 maupun Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 2024-2026.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rencana kerja tahun 2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang diupayakan melalui 3 strategi yaitu (1) Peningkatan Daya Saing Dan Kewirausahaan Pemuda; (2) Peningkatan Daya Saing Olahraga Jawa Tengah; dan (3) Peningkatan Kualitas Daya Tarik Dan Atraksi Atau Event Pariwisata Di Daerah yang kemudian dijabarkan melalui 6 Arah kebijakan yaitu (1) Fasilitasi minat pemuda dalam berwirausaha di kabupaten zona merah dengan tingkat kemiskinan tinggi; (2) Peningkatan kualitas SDM Olahraga; (3) Pembinaan atlet dan pelaku olahraga melalui penyelenggaraan kejuaraan olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan serta pelatihan; (4) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan; (5) Pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata; dan (6) Penguatan sumber daya manusia, lembaga dan kualitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Rencana Kerja (Renja) ini berisi tentang bagaimana mimpi untuk menjadikan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Provinsi Jawa Tengah ini menjadi lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Melalui keberhasilan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, merupakan hasil kerja keras dan koordinasi yang baik dari setiap Dinas yang membidangi urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun stakeholder terkait. Harapan kami, semoga dengan adanya Rencana Kerja (Renja) ini bermanfaat bagi perkembangan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata dan dapat menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024.

## LAMPIRAN

### Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Perencanaan yang berbasis risiko menjadi hal penting agar sejak awal perencanaan, perangkat daerah sudah dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang, dan sudah dilakukan upaya mitigasi sejak awal. Oleh karena itu dalam menyusun Renja PD, manajemen risiko menjadi proses yang terintegrasi dan dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan Renja PD. Kertas kerja manajemen risiko harus dilampirkan dalam dokumen Renja PD. Proses manajemen risiko berdasarkan pada Pergub Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

**a. Identifikasi Risiko**

**Tabel 1 Identifikasi Risiko**

Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
						Uraian	Pihak yang Terkena
Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah	Pelayanan Perangkat Daerah Tidak Maksimal	Risiko Operasional	Kurangnya Peningkatan Kapasitas Sdm	Tidak Optimalnya Pelayanan Perangkat Daerah	Disporapar Prov Jateng
		Persentase Tingkat Ketercapaian Kinerja Perangkat Daerah	Mendapatkan Nilai Yang Kurang Baik Saat Evaluasi Kinerja	Risiko Operasional	Tidak Terorganisirnya Pelaksanaan Kegiatan	Kinerja Tidak Tercapai	Disporapar Prov Jateng
Sasaran Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Tidak terselenggaranya kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan	Risiko Operasional	Tidak Optimalnya Perencanaan, perubahan teknis secara mendadak	Mendapatkan catatan evaluasi	Disporapar Provinsi Jawa Tengah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	Ketidaksesuaian dalam penyajian laporan keuangan	Risiko Operasional	Audit Internal belum berjalan secara optimal	Menjadi catatan pemeriksa	Disporapar Provinsi Jawa Tengah
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang Miliki Daerah pada Perangkat Daerah	Rusaknya peralatan penunjang perangkat daerah	Risiko Operasional	Perawata barang yang kurang optimal	Tidak optimalnya pelaksanaan pelayanan perangkat daerah	Disporapar Prov Jateng
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Standar Layanan	Kesalahan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Risiko Operasional	Kurangnya optimalnya pelayanan kepegawaian	Pelayanan Perangkat Daerah tidak optimal	Disporapar prov Jateng
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum	Tidak optimalnya pelayanan perangkat	Risiko Operasional	Tidak terpenuhinya standar pelayanan PD	Nilai Kepuasan Masyarakat Rendah	Disporapar Prov Jateng

		Perangkat Daerah yang Sesuai Standar Layanan	daerah				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan	Rusaknya barang penunjang perangkat daerah	Risiko Operasional	Barang yang ada tidak sesuai spesifikasi	tidak optimalnya pelayanan perangkat daerah	Disporapar Prov Jateng
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun	Mendapatkan komplain terkait penyediaan jasa penunjang	Risiko Operasional	tidak optimalnya perencanaan	Tidak optimalnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Disporapar Prov Jateng
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Pemeliharaan	Rusaknya barang penunjang perangkat daerah	Risiko Operasional	Kurangnya pemeliharaan	Pelayanan perangkat daerah terganggu	Disporapar Prov Jateng
Sasaran Program	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Wirausaha Muda Mandiri	Kurangnya Kualitas Dan Daya Saing Pemuda Dalam Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Ekonomi	Risiko Strategis	1. Semakin Berkembangnya Kebutuhan Pasar 2. Kurangnya Inovasi Wirausaha Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemuda 3. Kurangnya Ilmu Dan Keterampilan Yang Dimiliki Pemuda 4. Minimnya Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Pemuda Untuk Mengembangkan Wirausaha 5. Minimnya Fasilitas Untuk Pemuda Agar Dapat Mengembangkan Wirausaha 6. Kurangnya Modal Yang Dimiliki Pemuda Untuk Memulai Usaha	1. Menurunnya Kepercayaan Diri Pemuda Untuk Memulai Wirausaha 2. Ide Inovasi Yang Dimiliki Pemuda Tidak Dapat Dijalankan 3. Kurang Berkembangnya Pemuda Dalam Sektor Ekonomi 4. Kurangnya Minat Dari Pemuda Untuk Berwirausaha 5. Kurangnya Lapangan Pekerjaan Yang Akan Tercipta 6. Kurangnya Wirausaha Sukses Di Usia Pemuda	Pemuda
Sasaran Kegiatan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan	Peningkatan Jumlah Lokus Unggulan Hasil	Kurang Berkembangnya Pemuda Peserta Program	Risiko Strategis	1. Kurangnya modal awal yang dimiliki Peserta	1. Desa sulit untuk dilembangkan	Pemuda dan masyarakat

	Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Pendampingan Kepeloporan Pemuda	PKKP di Desa Penempatan		2. Kurangnya kemampuan membangun kepercayaan dari masyarakat 3. Kurangnya keterbukaan dari masyarakat untuk berinovasi 4. Kurangnya sarana dan prasara di Desa Penempatab untuk mengembangkan diri 5. Waktu yang dirasa masih kurang sehingga tidak bisa mendalami dan mengembangkan potensi desa 6. Semakin minimnya jumlah pemuda di desa	potensinya 2. Jumlah pemuda di desa semakin berkurang karena minimnya lapangan pekerjaan 3. Tidak adanya inovasi baru dalam pengembangan desa 4. Produktivitas ekonomi di desa menjadi rendah	
			Jumlah pemuda kader provinsi dari seluruh kab/kota yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Risiko Strategis	kurangnya kesadaran dan daya saing pemuda di era globalisasi	1. kurang bersaingnya pemuda di era globalisasi 2. terkikisnya jiwa Nasionalisme 3. berkurangnya jiwa kepeloporan para pemuda	pemuda dan masyarakat
Sasaran kegiatan		Jumlah wirausaha muda	Kurangnya Minat Pemuda untuk Berwirausaha dalam Upaya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi	Risiko Strategis	1. Kurangnya modal untuk memulai berwirausaha 2. Kurangnya minat pemuda untuk memulai berwirausaha 3. Kurangnya sarana dan prasarana Pemuda untuk memulai wirausaha 4. Kurangnya fasilitasi Pemuda untuk memulai wirausaha 5. Kurangnya ilmu dan kemampuan Pemuda dalam manajemen wirausaha 6. Kurangnya mentor bagi Pemuda untuk memulai wirausaha	1. Kurangnya kepercayaan diri Pemuda untuk mulai berwirausaha 2. Kurangnya inovasi wirausaha dari Pemuda 3. Kurangnya jumlah wirausaha dari Pemuda 4. Kurangnya lapangan pekerjaan baru	Pemuda
Sasaran		Tersedianya data	penurunan moral dan	Risiko	kurangnya pemahaman	menurunnya moralitas	Pemuda

Kegiatan		capaian IPP domain Pendidikan; Kesehatan dan kesejahteraan; gender dan diskriminasi	pengetahuan pendidikan kesehatan	Operasional	pemuda terhadap nilai-nilai luhur pancasila dan pengetahuan pendidikan kesehatan	para pemuda terhadap kehidupan bermasyarakat dan kurangnya pengetahuan terhadap pendidikan kesehatan	
		Jumlah Pemuda Aktif Dalam Berorganisasi	Rendahnya Kesadaran Pemuda Untuk Partisipasi Dalam Organisasi Kepemudaan	Risiko Operasional	Kurangnya Sosialisasi Dan Pendampingan Pemuda Dalam Membangkitkan Kesadaran Untuk Pemuda Dalam Berpartisipasi	Kepesertaan Pemuda Dalam Organisasi Rendah	Provinsi Jawa Tengah
			Pemuda Enggan Untuk Berpartisipasi Dalam Organisasi Kepemudaan	Risiko Operasional	Kurangnya Sosialisasi Dan Pendampingan Pemuda	Kemandirian Dan Karakter Pemuda Berkurang	Pemuda
Sasaran Kegiatan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan provinsi	kegiatan pemuda tidak terorganisir	Risiko Operasional	kurangnya pemahaman pemuda untuk berorganisasi	tidak adanya organisasi kepemudaan	Pemuda
Sasaran Program	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Perolehan Medali	Tidak tercapainya target perolehan medali	Risiko Operasional	atlet-atlet yang berpotensi pindah ke daerah lain	perolehan medali tidak naik atau bahkan bisa jadi turun sebab perpindahan atlet-atlet berpotensi tersebut	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Disporapar Prov. Jateng
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Peningkatan Jumlah Peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi	Tidak terselenggaranya kejuaraan/kompetisi	Risiko Operasional	Minimnya alokasi dana yang dianggarkan untuk penyelenggaraan kejuaraan atau keikutsertaan/pastisipasi dalam kejuaraan olahraga	Beberapa pertandingan tidak terselenggara dengan baik dari segi teknis pertandingan dan yang lainnya.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Atlet, Pelatih
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Peningkatan Jumlah atlet berprestasi sesuai jenjang tingkat nasional	Kurang optimalnya penyediaan data dan informasi keolahragaan di Jawa Tengah	Risiko Operasional	Data tidak di update secara berkala, Keterbatasan SDM yang berkompetensi di daerah	Penyediaan data keolahragaan tidak tersaji dengan baik sehingga masyarakat atau stakeholder tidak mendapatkan informasi keolahragaan secara menyeluruh. Menurunnya daya saing keolahragaan di Jawa	Masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Disporapar Prov. Jateng

						Tengah.	
	Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan	Prestasi di tingkat olahraga pendidikan menurun	Risiko Operasional	Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga Masih minimnya jumlah kompetisi/kejuaraan olahraga di Provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat olahraga pendidikan menurun dari tahun sebelumnya	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Disporapar Prov. Jateng
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Masyarakat Yang Bugar	Turunnya Tingkat Kebugaran Masyarakat	Risiko Operasional	Masih Rendahnya Budaya Berolahraga	Turunnya Persentase Masyarakat Yang Bugar, Banyak Masyarakat Yang Tidak Sehat Dan Rentan Sakit	Masyarakat Provinsi Jawa Tengah
Sasaran Program	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Kawasan Pariwisata Yang Dikembangkan	Pengembangan Kawasan Pariwisata Tidak Disertai Dengan Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya	Risiko Strategis	Perencanaan Lintas Sektoral Pada Pengembangan Kawasan Pariwisata Dari Segi Aksesibilitas, Atraksi, Amenitas, Aktivitas, Akomodasi, Dan Ancillary Kurang Terkoordinasi	Hasil Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Tidak Dapat Dimanfaatkan Secara Optimal	Disporapar
Sasaran Strategis	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Daya Tarik Wisata di Jawa Tengah yang tidak berdaya saing	Risiko Strategis	Kurangnya inovasi atraksi wisata sesuai kebutuhan dan permintaan wisatawan	Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan di DTW	Provinsi Jawa Tengah
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	Pengembangan Aset Pariwisata Milik Provinsi Jawa Tengah	Risiko Fraud	Penyedia tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Kontruksi untuk PPKom sesuai dengan ketentuan Kontrak	Tidak tercapainya progres fisik sesuai kesepakatan kontrak, dikarenakan pihak kontraktor tidak memiliki manajemen keuangan internal yang baik atau tidak memiliki cukup modal untuk melaksanakan pekerjaan, (walaupun sudah mencairkan uang muka dan termin	PPKom

						pembayaran) sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi terhambat	
Sasaran Strategis	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Usaha Pariwisata yang memiliki TDUP/NIB	Rendahnya9 pemenuhan standarisasi dan legalitas usaha pariwisata di Jawa Tengah	Risiko Strategis	- Kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha pariwisata terkait standarisasi dan perizinan usaha pariwisata - Kurangnya pelaku usaha pariwisata terkait standarisasi dan perizinan usaha pariwisata	Menurunnya 99kunjungan wisatawan dan terganggunya operasional usaha pariwisata karena belum terpenuhinya legalitas usahanya.	Pelaku usaha pariwisata di Jawa Tengah
Sasaran Program	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Menurunnya Perjalanan Dan Lama Tinggal Wisatawan Di Jawa Tengah	Risiko Operasional	Kurangnya Dukungan Kepada Rendahnya Melalui Adaptasi Teknologi Digital, Strategi Pemasaran Bersama, Dan Transisi Ke Arah Pariwisata Berkelanjutan	Berkurangnya Pengeluaran Konsumsi Wisatawan	Provinsi Jawa Tengah
			Menurunnya Jumlah Pengguna Sarpras Pemasaran Pariwisata	Risiko Strategis	Kurangnya Jenis Media Informasi Pemasaran Pariwisata Yang Digunakan Dan Materi / Konten Informasi Pemasaran Pariwisata Yang Kurang Menarik	Menurunnya Traffic Pengguna Media Yang Dikelola Oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah	PROVINSI JAWA TENGAH
Sasaran Strategis	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengguna Media Sarpras Pemasaran Pariwisata	Menurunnya jumlah pengguna sarpras pemasaran pariwisata	Risiko Strategis	Kurangnya jenis media informasi pemasaran pariwisata yang digunakan dan materi / konten informasi pemasaran pariwisata yang kurang menarik	Menurunnya traffic pengguna media yang dikelola oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah
Sasaran Strategis	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Kurang Optimalnya Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri	Risiko Strategis	1. Terbatasnya Jumlah Sdm Pengelola Pendataan Di Daerah; 2. Terlambatnya Pelaporan Data Tiap Bulannya; 3. Luasnya Cakupan Lokus Pendataan;	1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Sebagai Bahan Penyusunan Kebijakan; 2. Menurunnya Daya Saing Pariwisata Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah

					4. Target Pasar Potensial Jawa Tengah Belum Optimal Dilakukan ; 5. Terbatasnya Penentuan Peserta Famtrip.		
Sasaran Strategis	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tujuan Pasar Wisata Potensial	Kurang optimalnya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri	Risiko Strategis	1. Terbatasnya jumlah SDM pengelola pendataan di daerah; 2. Terlambatnya pelaporan data tiap bulannya; 3. Luasnya cakupan lokus pendataan; 4. Target pasar potensial Jawa Tengah belum optimal dilakukan ; 5. Terbatasnya penentuan peserta famtrip .	1. Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai bahan penyusunan kebijakan; 2. Menurunnya daya saing pariwisata Jawa Tengah.	Provinsi Jawa Tengah
Sasaran Program	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Menurunnya Kualitas Promosi Pariwisata	Risiko Strategis	Kurangnya Kualitas Promosi Dan Informasi Pariwisata	Menurunnya Minat Kunjungan Wisatawan Ke Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah
Sasaran Program	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi Sarana Prasarana Kota Kreatif Yang Teruji Petik (Kabupaten/Kota Layanan)	Kab/Kota (Kata) Kreatif Yang Uji Petik Pmk3i Tidak Sesuai Target Waktu Yang Di Tentukan	Risiko Operasional	Kurangnya Pemerataan Pemahaman Pelaku Usaha Parekraf Dalam Kesempatan Memperoleh Manfaat Serta Mempersiapkan Sdm Pada Sub Sektor Ekonomi Kreatif (Khususnya Kriya, Kuliner Dan Fashion) Dalam Pengisian Borang, Ujipetik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif.	Pengajuan Tidak Dapat Diproses Oleh Kemenparekraf	Kab/Kota Dan Pelaku Ekonomi Kreatif
Sasaran Kegiatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang PMK3I	Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang uji petik PMK3I tidak sesuai target waktu yang di tentukan	Risiko Operasional	Kurangnya pemerataan Pemahaman pelaku usaha parekraf dalam kesempatan memperoleh manfaat serta mempersiapkan SDM	Proses Pengisian dan pengajuan Uji petik Kab/Kota (KaTa) Kreatif menjadi lebih lama dan tidak sesuai dengan harapan (waktu tidak sesuai target)	Disporapar

					pada Sub Sektor Ekonomi Kreatif (Khususnya Kriya, Kuliner dan Fashion) dalam pengisian borang, ujipetik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif.		
Sasaran Kegiatan	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi HKI	Kurang meratanya kesempatan bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memperoleh fasilitas Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran untuk kegiatan tersebut	Kurang maksimalnya pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah yang tersertifikasi Hak Kekayaan Intelektual	Para pelaku ekonomi kreatif
Sasaran Program	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Dan Sdm Pariwisata Yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Kurangnya Mengimplementasikan Adaptasi, Inovasi, Dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dan Pelaku Parekrakraf	Risiko Operasional	Rendahnya Komitmen Untuk Mendukung Penguatan Ekosistem Sektor Parekrakraf Melalui Pendekatan Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Parekrakraf Dalam Pembangunan Yang Berpusat Pada Masyarakat.	Tidak Meratanya Sdm Parekrakraf Yang Sudah Tersertifikasi	Masyarakat Jawa Tengah
Sasaran Program	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Kurangnya Mengimplementasikan Adaptasi, Inovasi, Kolaborasi Pemangku Kepentingan dan Pelaku Pariwisata	Risiko Operasional	Rendahnya Komitmen untuk mendukung Penguatan Ekosistem Sektor Pariwisata melalui pendekatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) Pariwisata dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat.	Rendahnya Komitmen untuk mendukung Penguatan Ekosistem Sektor Pariwisata melalui pendekatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) Pariwisata dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat.	Masyarakat Jawa Tengah
Sasaran Kegiatan	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif yang di latih dan disertifikasi	Kurang meratanya kesempatan bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memperoleh fasilitas pelatihan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran untuk kegiatan tersebut	Kurang maksimalnya pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah yang terlatih dan tersertifikasi	Para pelaku ekonomi kreatif

			ekonomi kreatif dan sertifikasi kompetensi			kompetensi	
Sasaran Program	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	Kurangnya mengimplementasikan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi pemangku kepentingan dan Pelaku Parekrakraf	Risiko Operasional	Rendahnya komitmen untuk mendukung penguatan ekosistem sektor parekrakraf Melalui pendekatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Parekrakraf dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat.	Tidak Meratanya SDM Parekrakraf yang sudah tersertifikasi	Masyarakat Jawa Tengah
Sasaran Program	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (Pplop) Yang Berprestasi	Pembinaan Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (Pplop) Berprestasi Harus Ditingkatkan	Risiko Strategis	Pembinaan Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (Pplop) Mempunyai Potensi Besar Dalam Mencetak Atlet Nasional	Dalam Pelaksanaan Pembinaan Atlet Prestasi Membutuhkan Fasilitas Dan Pengalaman Dalam Bertanding Yang Cukup, Kebutuhan Dalam Progam Uji Tanding Dan Pengiriman Kejuaraan Dibutuhkan Untuk Dapat Mengevaluasi Hasil Pelatihan Dalam Pembinaan	Atlet Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (Pplop)
Sasaran Strategis	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi	Berkurangnya peserta yang berpartisipasi dalam Kejuaraan	Risiko Strategis	1. Minimnya alokasi anggaran untuk Pengiriman Kejuaraan 2. Jadwal event kejuaraan yang belum pasti	Berkurangnya jumlah peserta yang berpartisipasi dalam Kejuaraan	Atlet PPLOP
Sasaran Strategis	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Peningkatan jumlah atlet dan pelatih berprestasi sesuai jenjang (Kelompok Umur) tingkat nasional	1. Atlet yang tidak mengikuti Pembinaan 2. atlet dan pelatih yang tidak berprestasi	Risiko Strategis	1. Pembinaan Atlet yang kurang optimal 2. Kurangnya ketersediaan perlengkapan dan Sarana prasarana untuk Atlet Pelatih 3. Kurang Optimal Progam Pelatihan untuk Pelatih	Berkurangnya jumlah atlet dan pelatih milik daerah	Provinsi Jawa Tengah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan	Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat	Risiko Operasional	Keterbatasan Kualitas Dan Kuantitas Sdm Pada Balai Pemusatan Pendidikan Dan	Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian Dan	Balai Pemusatan Pendidikan

	DAERAH PROVINSI	Keuangan Perangkat Daerah	Daerah Masih Harus Ditingkatkan		Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	Keuangan Kurang Cepat Penyelesaiannya, Dari Sisi Kepegawaian Masih Harus Ditingkatkan Pengelolaan Data Kepegawaianya. Dari Sisi Administrasi Keuangan Penyelesaian Administrasi Keuangan Mengalami Keterlambatan	Dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Tengah
Sasaran Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Proses klaim Asuransi sulit dilakukan	Risiko Operasional	Data dukung Klaim Asuransi tidak lengkap	Klaim Asuransi tidak dapat dilakukan	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Tengah
Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Belanja Administrasi umum Perangkat Daerah yang dibutuhkan masih lebih banyak dari yang tersedia	Risiko Operasional	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang tersedia terbatas	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Tengah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Yang Dibutuhkan Masih Lebih Banyak Dari Yang Tersedia	Risiko Operasional	Barang Milik Daerah yang ada saat ini sudah belum dapat memenuhi kebutuhan atlet, pelatih dan masyarakat pengguna sarana prasarana olahraga di kawasan olahraga jatidiri	Kurang efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan atlet, pelatih dan masyarakat pengguna kawasan olahraga jatidiri	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Tengah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Penyediaan tidak tepat waktu	Risiko Operasional	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar

							Provinsi Jawa Tengah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Meningkatnya Kerusakan Barang Milik Daerah dan Kerusakan Barang Milik Daerah terjadi secara bersamaan	Risiko Operasional	Keterbatasan Anggaran dan Barang Milik Daerah yang biaya pemeliharaannya sangat mahal	Dengan kurang maksimalnya fungsi barang milik daerah mengakibatkan pelayanan umum dan masyarakat kurang maksimal dan terganggu	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Tengah

## b. Analisis Risiko

**Tabel 2 Analisis Risiko**

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Yang Melekat		
	Skala probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelayanan Perangkat Daerah Tidak Maksimal	3	3	9	Ada	Pelatihan Dan Bimbingan Teknis	Memadai	2	2	4
Mendapatkan Nilai Yang Kurang Baik Saat Evaluasi Kinerja	3	3	9	Ada	Koordinasi Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Memadai	2	2	4
Tidak terselenggaranya kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan	3	3	9	Ada	Koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan dengan bidang/balai teknis terkait	Memadai	2	2	4
Ketidaksesuaian dalam penyajian laporan keuangan	3	2	6	Ada	Evaluasi penyajian laporan keuangan	Memadai	2	2	4
Rusaknya peralatan penunjang perangkat daerah	3	2	6	Ada	Inventarisir barang milik perangkat daerah	Memadai	2	2	4
Kesalahan administrasi	3	2	6	Ada	Evaluasi administrasi kepegawaian perangkat	Memadai	2	2	4

kepegawaian perangkat daerah					daerah				
Tidak optimalnya pelayanan perangkat daerah	3	2	6	Ada	Evaluasi pelayanan perangkat daerah	Memadai	2	2	4
Rusaknya barang penunjang perangkat daerah	3	3	9	Ada	Pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme yang berlaku	Memadai	2	2	4
Mendapatkan komplain terkait penyediaan jasa penunjang	3	2	6	Ada	Evaluasi Pelayanan publik secara berkala	Memadai	2	2	4
Rusaknya barang penunjang perangkat daerah	3	2	6	Ada	Monitoring berkala	Memadai	2	2	4
Kurangnya Kualitas Dan Daya Saing Pemuda Dalam Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Ekonomi	3	4	12	Ada	1. Sudah Ada Kebijakan Pergub Tentang Kewirausahaan 2. Sudah Ada Pelatihan Kewirausahaan Untuk Memberikan Ilmu Dan Bekal Kepada Pemuda 3. Sudah Ada Penerjunan Pemuda Potensial Ke Desa Untuk Mengembangkan Kemandirian Pemuda Dalam Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Ekonomi Pemuda	Belum Memadai	3	4	12
Kurang Berkembangnya Pemuda Peserta Program PKKP di Desa Penempatan	4	3	12	Ada	1. Menempatkan Pemuda Potensial di Desa yang termasuk dalam Zona Merah 2. Memberikan kemampuan dan keterampilan di para Pemuda Potential sebelum ditempatkan di Desa 3. Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten	Memadai	4	3	12

					dan Pemerintah Desa dalam pengembangan potensi desa				
Jumlah pemuda kader provinsi dari seluruh kab/kota yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	4	3	12	Ada	Jumlah pemuda kader provinsi dari seluruh kab/kota yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Belum Memadai	4	3	12
Kurangnya Minat Pemuda Untuk Berwirausaha Dalam Upaya Peningkatandaya Saing Dan Kemandirian Ekonomi	4	3	12	Ada	1. Pergub Tentang Kewirausahaan 2. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda 3. Penerjunan Pemuda Potensial Ke Desa	Memadai	4	3	12
Penurunan Moral Dan Pengetahuan Pendidikan Kesehatan	5	5	25	Ada	Sudah Ada Sosialisasi Dan Pendampingan Pemuda Terkait Dengan Peningkatan Moralitas Dan Pengetahuan Pendidikan Kesehatan	Belum Memadai	3	3	9
Rendahnya Kesadaran Pemuda Untuk Partisipasi Dalam Organisasi Kepemudaan	2	3	6	Ada	Peningkatan kegiatan kepemudaan	Memadai	2	3	6
Pemuda Enggan Untuk Berpartisipasi Dalam Organisasi Kepemudaan	4	5	20	Ada	Sudah Ada Sosialissi Dan Pendampingan Pemuda Terkait Dengan Kemandirian Dan Pembentukan Karakter Pemuda	Belum Memadai	4	4	16
Kegiatan Pemuda Tidak Terorganisir	5	5	25	Ada	Sudah Adanya Pelatihan Kaderisasi Dan Organisasi Kepemudaan	Belum Memadai	5	5	25
Tidak tercapai nya target perolehan medali	3	3	9	Ada	peningkatan pembinaan atlet berpotensi yang terprogam dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Memadai	2	2	4

					sehingga diharapkan mengurangi perpindahan atlet ke daerah lain.				
Tidak terselenggaranya kejuaraan/kompetisi	3	3	9	Ada	komunikasi dengan pihak terkait (pengprov, koni, dll)	Memadai	2	2	4
Kurang optimalnya penyediaan data dan informasi keolahragaan di Jawa Tengah	2	3	6	Ada	informasi data keolahrgaan baik di daerah maupun di tingkat Provinsi harus di update secara berkala, melaksanakan bintek alikasi SIMPORA setiap kali terdapat pengembangan sistem dan melaksanakan Rakor Data Keolahragaan dengan daerah dan stakeholder	Memadai	2	2	4
Prestasi di tingkat olahraga pendidikan menurun	3	3	9	Ada	Peningkatan pembinaan olahraga di tingkat pelajar Fasilitasi sarpras olahraga yang memadai	Belum Memadai	2	2	4
Turunnya Tingkat Kebugaran Masyarakat	3	2	6	Ada	Optimalisasi Kegiatan Olahraga Kemasyarakatan	Memadai	3	2	6
Pengembangan Kawasan Pariwisata Tidak Disertai Dengan Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya	3	2	6	Ada	Koordinasi Dengan OPD Terkait Yang Dapat Mendukung Pengembangan Pendukung Pengembangan Kawasan Pariwisata	Memadai	3	2	6
Daya Tarik Wisata Di Jawa Tengah Yang Tidak Berdaya Saing	1	1	1	Ada	Melakukan Koordinasi Lintas Sektoral Untuk Menentukan Arah Kebijakan Sebagai Tindaklanjut	Memadai	1	1	1
Pengembangan Aset	2	5	10	Ada	Dalam Proses Penetapan	Memadai	2	2	4

Pariwisata Milik Provinsi Jawa Tengah					Pemenang Ppkom Dibantu PPTK Harus Jeli Dan Cermat Dalam Mengecek Track Record Dan Keabsahan Kandidat Penyedia Jasa. Selalu Berkoordinasi Dengan Konsultan Pengawas Dan Kontraktor Untuk Melakukan Pengecekan Berkala Terhadap Progres Pekerjaan, Diadakan Rapat Progres Secara Rutin, Bahkan Apabila Perlu Jika Ditemukan Indikasi Penyelewengan Diterbitkan Surat Peringatan.				
Rendahnya9 Pemenuhan Standarisasi Dan Legalitas Usaha Pariwisata Di Jawa Tengah	2	2	4	Ada	- Pembinaan Usaha Pariwisata - Pengawasan Usaha Pariwisata Di Daerah - Terinventarisasi Nya 13 Usaha Pariwisata	Memadai	2	2	4
Menurunnya Perjalanan Dan Lama Tinggal Wisatawan Di Jawa Tengah	3	2	6	Ada	Optimalisasi Promosi Pariwisata Melalui Media Digital	Memadai	3	2	6
Menurunnya Jumlah Pengguna Sarpras Pemasaran Pariwisata	3	2	6	Ada	Mendorong Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota Untuk Mengirimkan Konten Terkait Pariwisata Di Wilayah, Mengadakan Lomba Foto Dan Lomba Video Untuk Meningkatkan Kualitas Konten Promosi Pariwisata	Memadai	3	2	6

Menurunnya Jumlah Pengguna Supras Pemasaran Pariwisata	3	2	6	Ada	Mendorong Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota Untuk Mengirim Konten Terkait Pariwisata Di Wilayah, Mengadakan Lomba Foto Dan Lomba Video Untuk Meningkatkan Kualitas Konten Promosi Pariwisata	Memadai	3	2	6
Kurang Optimalnya Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri	3	2	6	Ada	1. Melakukan Pengembangan Aplikasi Sisdaporapar Agar End-Usernya Bisa Sampai Ke Pengelola DTW Untuk Melakukan Penginapan Jumlah Kunjungan Wisatawan; 2. Rapat Koordinasi Per Tri Wulan; 3. Melakukan Koordinasi Permohonan Peserta Famtrip Dengan Dinas Pariwisata Di Luar Provinsi Jawa Tengah.	Memadai	3	2	6
Kurang Optimalnya Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri	2	3	6	Ada	1. Melakukan Pengembangan Aplikasi Sisdaporapar Agar End-Usernya Bisa Sampai Ke Pengelola DTW Untuk Melakukan Penginapan Jumlah Kunjungan Wisatawan; 2. Rapat Koordinasi Per Tri Wulan; 3. Melakukan Koordinasi Permohonan Peserta Famtrip Dengan Dinas Pariwisata Di Luar Provinsi Jawa Tengah.	Memadai	3	2	6
Menurunnya Kualitas	2	3	6	Ada	Menggencarkan Promosi	Belum Memadai	2	3	6

Promosi Pariwisata					Pariwisata Melalui Media Sosial				
Kab/Kota (Kata) Kreatif Yang Uji Petik Pmk3i Tidak Sesuai Target Waktu Yang Di Tentukan	3	2	6	Ada	Memetakan Dan Mengidentifikasi Potensi Untuk Menetapkan Subsektor Ekraf Yang Bisa Menjadi Unggulan Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Pmk3i)	Memadai	3	2	6
Kab/Kota (Kata) Kreatif Yang Uji Petik PMK3I Tidak Sesuai Target Waktu Yang Di Tentukan	3	2	6	Ada	Memadai	Memadai	3	2	6
Kurang Meratanya Kesempatan Bagi Para Pelaku Ekonomi Kreatif Untuk Memperoleh Fasilitas Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual	3	2	6	Ada	Pemerataan Kuota Peserta Fasilitas Sertifikasi HKI Tiap Kab/Kota	Memadai	3	2	6
Kurangnya Mengimplementasikan Adaptasi, Inovasi, Dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dan Pelaku Parekrakraf	3	2	6	Ada	Penguatan Pengembangan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Melalui Sertifikasi	Memadai	3	2	6
Kurangnya Mengimplementasikan Adaptasi, Inovasi, Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dan Pelaku Pariwisata	3	2	6	Ada	Penguatan Pengembangan SDM Pariwisata Melalui Pembekalan Dan Sertifikasi	Memadai	3	2	6
Kurang Meratanya Kesempatan Bagi Para Pelaku Ekonomi Kreatif Untuk	3	2	6	Ada	Pemerataan Kuota Peserta Pelatihan Dan Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Tiap Kab/Kota	Memadai	2	3	6

Memperoleh Fasilitas Pelatihan Ekonomi Kreatif Dan Sertifikasi Kompetensi									
Kurangnya mengimplementasikan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi pemangku kepentingan dan Pelaku Parekrakraf	3	2	6	Ada	Penguatan pengembangan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif melalui sertifikasi	Memadai	3	2	6
Pembinaan Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (Pplop) Berprestasi Harus Ditingkatkan	3	3	9	Ada	1. Memenuhi Kebutuhan Gizi Atlet 2. Melakukan Progam Uji Tanding 3. Mengikuti Kejuaraan Tingkat Nasional	Memadai	3	3	9
Berkurangnya Peserta Yang Berpartisipasi Dalam Kejuaraan	3	2	6	Ada	1. Peningkatan Anggaran Untuk Pengiriman Kejuaraan 2. Berkoordinasi Dengan Kementerian Pemuda Dan Olahraga	Memadai	3	2	6
1. Atlet Yang Tidak Mengikuti Pembinaan 2. Atlet Dan Pelatih Yang Tidak Berprestasi	4	4	16	Ada	1. Melakukan Efektifitas Pembinaan Atlet Dan Bekerjasama Dengan Stakeholder Terkait 2. Penambahan Perlengkapan Dan Sarana Prasarana Untuk Atlet 3. Bekerjasama Dengan Analisis Olahraga Dalam Perancangan Progam Latihan	Memadai	2	2	4
Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah Masih Harus Ditingkatkan	3	3	9	Ada	1. Berkoordinasi Dengan Pihak Terkait 2. Memotivasi Kepedulian Pegawai Terkait Pengelolaan Data Kepegawaian Yang Lebih Baik	Memadai	2	3	6

					3. Melakukan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Supaya Tidak Terjadi Keterlambatan 4. Memberdayakan Tenaga Non ASN				
Proses Klaim Asuransi Sulit Dilakukan	3	3	9	Ada	Dibentuk SK Kepala Dinas Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	Memadai	2	3	6
Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan Masih Lebih Banyak Dari Yang Tersedia	3	3	9	Ada	Memaksimalkan Pemanfaatan Anggaran Yang Tersedia Serta Melakukan Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaannya	Memadai	2	3	6
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Yang Dibutuhkan Masih Lebih Banyak Dari Yang Tersedia	3	3	9	Ada	Optimalisasi Penggunaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Sudah Ada	Memadai	2	3	6
Penyediaan Tidak Tepat Waktu	3	2	6	Ada	Dibentuk SK Kepala Dinas Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	Memadai	2	2	4
Meningkatnya Kerusakan Barang Milik Daerah Dan Kerusakan Barang Milik Daerah Terjadi Secara Bersamaan	3	3	9	Ada	Melakukan Skala Prioritas Dalam Melakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Memadai	2	2	4

**c. Penetapan Risiko Prioritas**

Risiko prioritas merupakan risiko yang akan dilakukan tindak pengendalian lebih lanjut. Penetapan risiko prioritas berdasarkan pada skala atau level risiko serta selera risiko yang masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi, dan/atau kategori sedang.

**Tabel 3 Risiko Prioritas**

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Pelayanan Perangkat Daerah Tidak Maksimal	9	Disporapar Prov Jateng	Kurangnya Peningkatan Kapasitas Sdm	Tidak Optimalnya Pelayanan Perangkat Daerah
Mendapatkan Nilai Yang Kurang Baik Saat Evaluasi Kinerja	9	Disporapar Prov Jateng	Tidak Terorganisirnya Pelaksanaan Kegiatan	Kinerja Tidak Tercapai
Tidak terselenggaranya kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan	9	Disporapar Provinsi Jawa Tengah	Tidak Optimalnya Perencanaan, perubahan teknis secara mendadak	Mendapatkan catatan evaluasi
Ketidaksesuaian dalam penyajian laporan keuangan	6	Disporapar Provinsi Jawa Tengah	Audit Internal belum berjalan secara optimal	Menjadi catatan pemeriksa
Rusaknya peralatan penunjang perangkat daerah	6	Disporapar Prov Jateng	Perawatan barang yang kurang optimal	Tidak optimalnya pelaksanaan pelayanan perangkat daerah
-				
Kesalahan administrasi kepegawaian perangkat daerah	6	Disporapar prov Jateng	Kurangnya optimalnya pelayanan kepegawaian	Pelayanan Perangkat Daerah tidak optimal
Tidak optimalnya pelayanan perangkat daerah	6	Disporapar Prov Jateng	Tidak terpenuhinya standar pelayanan PD	Nilai Kepuasan Masyarakat Rendah
Rusaknya barang penunjang perangkat daerah	9	Disporapar Prov Jateng	Barang yang ada tidak sesuai spesifikasi	tidak optimalnya pelayanan perangkat daerah
Mendapatkan komplain terkait penyediaan jasa penunjang	6	Disporapar Prov Jateng	tidak optimalnya perencanaan	Tidak optimalnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Rusaknya barang penunjang perangkat daerah	6	Disporapar Prov Jateng	Kurangnya pemeliharaan	Pelayanan perangkat daerah terganggu
Kurangnya Kualitas Dan Daya Saing Pemuda Dalam Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Ekonomi	12	Pemuda	1. Semakin Berkembangnya Kebutuhan Pasar 2. Kurangnya Inovasi Wirausaha Yang Dapat	1. Menurunnya Kepercayaan Diri Pemuda Untuk Memulai Wirausaha 2. Ide Inovasi Yang Dimiliki Pemuda Tidak Dapat

			<p>Dilakukan Oleh Pemuda</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kurangnya Ilmu Dan Keterampilan Yang Dimiliki Pemuda</li> <li>4. Minimnya Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Pemuda Untuk Mengembangkan Wirausaha</li> <li>5. Minimnya Fasilitas Untuk Pemuda Agar Dapat Mengembangkan Wirausaha</li> <li>6. Kurangnya Modal Yang Dimiliki Pemuda Untuk Memulai Usaha</li> </ol>	<p>Dijalankan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kurang Berkembangnya Pemuda Dalam Sektor Ekonomi</li> <li>4. Kurangnya Minat Dari Pemuda Untuk Berwirausaha</li> <li>5. Kurangnya Lapangan Pekerjaan Yang Akan Tercipta</li> <li>6. Kurangnya Wirausaha Sukses Di Usia Pemuda</li> </ol>
Kurang Berkembangnya Pemuda Peserta Program PKKPP di Desa Penempatan	12	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya modal awal yang dimiliki Peserta</li> <li>2. Kurangnya kemampuan membangun kepercayaan dari masyarakat</li> <li>3. Kurangnya keterbukaan dari masyarakat untuk berinovasi</li> <li>4. Kurangnya sarana dan prasarana di Desa Penempatan untuk mengembangkan diri</li> <li>5. Waktu yang dirasa masih kurang sehingga tidak bisa mendalami dan mengembangkan potensi desa</li> <li>6. Semakin minimnya jumlah pemuda di desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa sulit untuk dilembangkan potensinya</li> <li>2. Jumlah pemuda di desa semakin berkurang karena minimnya lapangan pekerjaan</li> <li>3. Tidak adanya inovasi baru dalam pengembangan desa</li> <li>4. Produktivitas ekonomi di desa menjadi rendah</li> </ol>
Jumlah pemuda kader provinsi dari seluruh kab/kota yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	12	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	kurangnya kesadaran dan daya saing pemuda di era globalisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kurang bersaingnya pemuda di era globalisasi</li> <li>2. terkikisnya jiwa Nasionalisme</li> <li>3. berkurangnya jiwa kepeloporan para pemuda</li> </ol>

Kurangnya Minat Pemuda Untuk Berwirausaha Dalam Upaya Peningkatandaya Saing Dan Kemandirian Ekonom	12	Pemuda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya modal untuk memulai berwirausaha</li> <li>2. Kurangnya minat pemuda untuk memulai berwirausaha</li> <li>3. Kurangnya sarana dan prasarana Pemuda untuk memulai wirausaha</li> <li>4. Kurangnya fasilitasi Pemuda untuk memulai wirausaha</li> <li>5. Kurangnya ilmu dan kemampuan Pemuda dalam manajemen wirausaha</li> <li>6. Kurangnya mentor bagi Pemuda untuk memulai wirausaha</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kepercayaan diri Pemuda untuk mulai berwirausaha</li> <li>2. Kurangnya inovasi wirausaha dari Pemuda</li> <li>3. Kurangnya jumlah wirausaha dari Pemuda</li> <li>4. Kurangnya lapangan pekerjaan baru</li> </ol>
Penurunan Moral Dan Pengetahuan Pendidikan Kesehatan	25	Pemuda	kurangnya pemahaman pemuda terhadap nilai-nilai luhur pancasila dan pengetahuan pendidikan kesehatan	menurunnya moralitas para pemuda terhadap kehidupan bermasyarakat dan kurangnya pengetahuan terhadap pendidikan kesehatan
Rendahnya Kesadaran Pemuda Untuk Partisipasi Dalam Organisasi Kepemudaan	6	Provinsi Jawa Tengah	Kurangnya Sosialisasi Dan Pendampingan Pemuda Dalam Membangkitkan Kesadaran Untuk Pemuda Dalam Berpartisipasi	Kepesertaan Pemuda Dalam Organisasi Rendah
Pemuda Enggan Untuk Berpartisipasi Dalam Organisasi Kepemudaan	20	Pemuda	Kurangnya Sosialisasi Dan Pendampingan Pemuda	Kemandirian Dan Karakter Pemuda Berkurang
Kegiatan Pemuda Tidak Terorganisir	25	Pemuda	kurangnya pemahaman pemuda untuk berorganisasi	tidak adanya organisasi kepemudaan
Tidak tercapai nya target perolehan medali	9	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Disporapar Prov. Jateng	atlet-atlet yang berpotensi pindah ke daerah lain	perolehan medali tidak naik atau bahkan bisa jadi turun sebab perpindahan atlet-atlet berpotensi tersebut
Tidak terselenggaranya kejuaraan/kompetisi	9	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Disporapar Prov.	Minimnya alokasi dana yang dianggarkan untuk	Beberapa pertandingan tidak terselenggara dengan baik

		Jateng	penyelenggaraan kejuaraan atau keikutsertaan/pastisipasi dalam kejuaraan olahraga	dari segi teknis pertandingan dan yang lainnya.
Kurang optimalnya penyediaan data dan informasi keolahragaan di Jawa Tengah	6	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Disporapar Prov. Jateng	Data tidak di update secara berkala, Keterbatasan SDM yang berkompentensi di daerah	Penyediaan data keolaharagan tidak tersaji dengan baik sehingga masyarakat atau stakeholder tidak mendapatkan informasi keolahragaan secara menyeluruh. Menurunnya daya saing keolahragaan di Jawa Tengah.
Prestasi di tingkat olahraga pendidikan menurun	9	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Disporapar Prov. Jateng	Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga Masih minimnya jumlah kompetisi/kejuaraan olahraga di Provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat olahraga pendidikan menurun dari tahun sebelumnya
Turunnya Tingkat Kebugaran Masyarakat	6	Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Masih Rendahnya Budaya Berolahraga	Turunnya Persentase Masyarakat Yang Bugar, Banyak Masyarakat Yang Tidak Sehat Dan Rentan Sakit
Pengembangan Kawasan Pariwisata Tidak Disertai Dengan Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya	6	Disporapar	Perencanaan Lintas Sektoral Pada Pengembangan Kawasan Pariwisata Dari Segi Aksesibilitas, Atraksi, Amenitas, Aktivitas, Akomodasi, Dan Ancilliary Kurang Terkoordinasi	Hasil Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Tidak Dapat Dimanfaatkan Secara Optimal
Pengembangan Aset Pariwisata Milik Provinsi Jawa Tengah	10	PPKom	Penyedia tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Kontruksi untuk	Tidak tercapainya progres fisik sesuai kesepakatan kontrak, dikarenakan pihak kontraktor tidak memiliki

			PPKom sesuai dengan ketentuan Kontrak	manajemen keuangan internal yang baik atau tidak memiliki cukup modal untuk melaksanakan pekerjaan, (walaupun sudah mencairkan uang muka dan termin pembayaran) sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi terhambat
Menurunnya Perjalanan Dan Lama Tinggal Wisatawan Di Jawa Tengah	6	Provinsi Jawa Tengah	Kurangnya Dukungan Kepada Rendahnya Melalui Adaptasi Teknologi Digital, Strategi Pemasaran Bersama, Dan Transisi Ke Arah Pariwisata Berkelanjutan	Berkurangnya Pengeluaran Konsumsi Wisatawan
Menurunnya Jumlah Pengguna Sarpras Pemasaran Pariwisata	6	PROVINSI JAWA TENGAH	Kurangnya Jenis Media Informasi Pemasaran Pariwisata Yang Digunakan Dan Materi / Konten Informasi Pemasaran Pariwisata Yang Kurang Menarik	Menurunnya Traffic Pengguna Media Yang Dikelola Oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah
Menurunnya Jumlah Pengguna Saprmas Pemasaran Pariwisata	6	Provinsi Jawa Tengah	Kurangnya jenis media informasi pemasaran pariwisata yang digunakan dan materi / konten informasi pemasaran pariwisata yang kurang menarik	Menurunnya traffic pengguna media yang dikelola oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah
Kurang Optimalnya Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri	6	Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya Jumlah Sdm Pengelola Pendataan Di Daerah;</li> <li>2. Terlambatnya Pelaporan Data Tiap Bulannya;</li> <li>3. Luasnya Cakupan Lokus Pendataan;</li> <li>4. Target Pasar Potensial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Sebagai Bahan Penyusunan Kebijakan;</li> <li>2. Menurunnya Daya Saing Pariwisata Jawa Tengah</li> </ol>

			Jawa Tengah Belum Optimal Dilakukan ; 5. Terbatasnya Penentuan Peserta Famtrip.	
Kurang Optimalnya Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri	6	Provinsi Jawa Tengah	1. Terbatasnya jumlah SDM pengelola pendataan di daerah; 2. Terlambatnya pelaporan data tiap bulannya; 3. Luasnya cakupan lokus pendataan; 4. Target pasar potensial Jawa Tengah belum optimal dilakukan ; 5. Terbatasnya penentuan peserta famtrip .	1. Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai bahan penyusunan kebijakan; 2. Menurunnya daya saing pariwisata Jawa Tengah.
Menurunnya Kualitas Promosi Pariwisata	6	Provinsi Jawa Tengah	Kurangnya Kualitas Promosi Dan Informasi Pariwisata	Menurunnya Minat Kunjungan Wisatawan Ke Jawa Tengah
Kab/Kota (Kata) Kreatif Yang Uji Petik Pmk3i Tidak Sesuai Target Waktu Yang Di Tentukan	6	Kab/Kota Dan Pelaku Ekonomi Kreatif	Kurangnya Pemerataan Pemahaman Pelaku Usaha Perekraf Dalam Kesempatan Memperoleh Manfaat Serta Mempersiapkan Sdm Pada Sub Sektor Ekonomi Kreatif (Khususnya Kriya, Kuliner Dan Fashion) Dalam Pengisian Borang, Ujipetik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif.	Pengajuan Tidak Dapat Diproses Oleh Kemenparekraf
Kab/Kota (Kata) Kreatif Yang Uji Petik PMK3I Tidak Sesuai Target Waktu Yang Di Tentukan	6	Disporapar	Kurangnya pemerataan Pemahaman pelaku usaha perekraf dalam kesempatan memperoleh manfaat serta mempersiapkan SDM	Proses Pengisian dan pengajuan Uji petik Kab/Kota (KaTa) Kreatif menjadi lebih lama dan tidak sesuai dengan harapan (waktu tidak sesuai target)

			pada Sub Sektor Ekonomi Kreatif (Khususnya Kriya, Kuliner dan Fashion) dalam pengisian borang, uji petik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif.	
Kurang Meratanya Kesempatan Bagi Para Pelaku Ekonomi Kreatif Untuk Memperoleh Fasilitas Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual	6	Para pelaku ekonomi kreatif	Keterbatasan anggaran untuk kegiatan tersebut	Kurang maksimalnya pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah yang tersertifikasi Hak Kekayaan Intelektual
Kurangnya Mengimplementasikan Adaptasi, Inovasi, Dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dan Pelaku Parekrakraf	6	Masyarakat Jawa Tengah	Rendahnya Komitmen Untuk Mendukung Penguatan Ekosistem Sektor Parekrakraf Melalui Pendekatan Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Parekrakraf Dalam Pembangunan Yang Berpusat Pada Masyarakat.	Tidak Meratanya Sdm Parekrakraf Yang Sudah Tersertifikasi
Kurangnya Mengimplementasikan Adaptasi, Inovasi, Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dan Pelaku Pariwisata	6	Masyarakat Jawa Tengah	Rendahnya Komitmen untuk mendukung Penguatan Ekosistem Sektor Pariwisata melalui pendekatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) Pariwisata dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat.	Tidak Meratanya SDM Pariwisata yang sudah tersertifikasi
Kurang Meratanya Kesempatan Bagi Para Pelaku Ekonomi Kreatif Untuk Memperoleh Fasilitas	6	Para pelaku ekonomi kreatif	Keterbatasan anggaran untuk kegiatan tersebut	Kurang maksimalnya pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah yang terlatih dan tersertifikasi kompetensi

Pelatihan Ekonomi Kreatif Dan Sertifikasi Kompetensi				
Kurangnya mengimplementasikan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi pemangku kepentingan dan Pelaku Parekrakraf	6	Disporapar	Rendahnya komitmen untuk mendukung penguatan ekosistem sektor parekrakraf Melalui pendekatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Parekrakraf dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat.	Tidak Meratanya SDM Parekrakraf yang sudah tersertifikasi
Pembinaan Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (Pplop) Berprestasi Harus Ditingkatkan	9	Atlet Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (Pplop)	Pembinaan Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (Pplop) Mempunyai Potensi Besar Dalam Mencetak Atlet Nasional	Dalam Pelaksanaan Pembinaan Atlet Prestasi Membutuhkan Fasilitas Dan Pengalaman Dalam Bertanding Yang Cukup, Kebutuhan Dalam Progam Uji Tanding Dan Pengiriman Kejuaraan Dibutuhkan Untuk Dapat Mengevaluasi Hasil Pelatihan Dalam Pembinaan
Berkurangnya Peserta Yang Berpartisipasi Dalam Kejuaraan	6	Atlet PPLOP	1. Minimnya alokasi anggaran untuk Pengiriman Kejuaraan 2. Jadwal event kejuaraan yang belum pasti	Berkurangnya jumlah peserta yang berpartisipasi dalam Kejuaraan
1. Atlet Yang Tidak Mengikuti Pembinaan 2. Atlet Dan Pelatih Yang Tidak Berprestasi	16	Provinsi Jawa Tengah	1. Pembinaan Atlet yang kurang optimal 2. Kurangnya ketersediaan perlengkapan dan Sarana prasarana untuk Atlet Pelatih 3. Kurang Optimal Progam Pelatihan untuk Pelatih	Berkurangnya jumlah atlet dan pelatih milik daerah
Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah Masih	9	Balai Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi	Keterbatasan Kualitas Dan Kuantitas Sdm Pada Balai Pemusatan Pendidikan	Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Harus Ditingkatkan		Jawa Tengah	Dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	Kurang Cepat Penyelesaiannya, Dari Sisi Kepegawaian Masih Harus Ditingkatkan Pengelolaan Data Kepegawaiannya. Dari Sisi Administrasi Keuangan Penyelesaian Administrasi Keuangan Mengalami Keterlambatan
Proses Klaim Asuransi Sulit Dilakukan	9	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Tengah	Data dukung Klaim Asuransi tidak lengkap	Klaim Asuransi tidak dapat dilakukan
Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan Masih Lebih Banyak Dari Yang Tersedia	9	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Tengah	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang tersedia terbatas
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Yang Dibutuhkan Masih Lebih Banyak Dari Yang Tersedia	9	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Tengah	Barang Milik Daerah yang ada saat ini sudah belum dapat memenuhi kebutuhan atlet, pelatih dan masyarakat pengguna sarana prasarana olahraga di kawasan olahraga jatidiri	Kurang efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan atlet, pelatih dan masyarakat pengguna kawasan olahraga jatidiri
Penyediaan Tidak Tepat Waktu	6	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Tengah	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat
Meningkatnya Kerusakan Barang Milik Daerah Dan Kerusakan Barang Milik Daerah Terjadi Secara Bersamaan	9	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Tengah	Keterbatasan Anggaran dan Barang Milik Daerah yang biaya pemeliharaannya sangat mahal	Dengan kurang maksimalnya fungsi barang milik daerah mengakibatkan pelayanan umum dan masyarakat kurang maksimal dan terganggu

#### **d. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian**

Rencana Tindak Pengendalian ini yang menjadi dasar dalam memastikan bahwa perencanaan yang disusun telah

berbasis pada risiko. Dipastikan bahwa RTP yang ditetapkan menjadi aktivitas perangkat daerah. Tabel RTP yang dituangkan dalam Bab III dan IV Renja PD.

**Tabel 4**  
**Rencana Tindak Pengendalian**

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesai an
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah	Pelayanan Perangkat Daerah Tidak Maksimal	9	Kurangnya Peningkatan Kapasitas Sdm	Tidak Optimalnya Pelayanan Perangkat Daerah	Pelatihan Dan Bimbingan Teknis	Disporapar Jateng	Tw IV
	Persentase Tingkat Ketercapaian Kinerja Perangkat Daerah	Mendapatkan Nilai Yang Kurang Baik Saat Evaluasi Kinerja	9	Tidak Terorganisirnya Pelaksanaan Kegiatan	Kinerja Tidak Tercapai	Koordinasi Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Disporapar Jateng	Tw IV
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Tidak terselenggaranya kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan	9	Tidak Optimalnya Perencanaan, perubahan teknis secara mendadak	Mendapatkan catatan evaluasi	Koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan dengan bidang/balai teknis terkait	Disporapar Jateng	Tw II
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	Ketidaksesuaian dalam penyajian laporan keuangan	6	Audit Internal belum berjalan secara optimal	Menjadi catatan pemeriksa	Evaluasi penyajian laporan keuangan	Disporapar Jateng	Tw III
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang Miliki Daerah pada Perangkat Daerah	Rusaknya peralatan penunjang perangkat daerah	6	Perawatan barang yang kurang optimal	Tidak optimalnya pelaksanaan pelayanan perangkat	Inventarisir barang milik perangkat daerah	Disporapar Jateng	Tw III

					daerah			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Standar Layanan	Kesalahan administrasi kepegawaian perangkat daerah	6	Kurangnya optimalnya pelayanan kepegawaian	Pelayanan Perangkat Daerah tidak optimal	Evaluasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	Disporapar Jateng	Tw III
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Standar Layanan	Tidak optimalnya pelayanan perangkat daerah	6	Tidak terpenuhinya standar pelayanan PD	Nilai Kepuasan Masyarakat Rendah	Evaluasi pelayanan perangkat daerah	Disporapar Jateng	Tw III
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan	Rusaknya barang penunjang perangkat daerah	9	Barang yang ada tidak sesuai spesifikasi	tidak optimalnya pelayanan perangkat daerah	Pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme yang berlaku	Disporapar Jateng	Tw III
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun	Mendapatkan komplain terkait penyediaan jasa penunjang	6	tidak optimalnya perencanaan	Tidak optimalnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Evaluasi Pelayanan publik secara berkala	Disporapar Jateng	Tw III
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Pemeliharaan	Rusaknya barang penunjang perangkat daerah	6	Kurangnya pemeliharaan	Pelayanan perangkat daerah terganggu	Monitoring berkala	Disporapar Jateng	Tw III
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Wirausaha Muda Mandiri	Kurangnya Kualitas Dan Daya Saing Pemuda Dalam Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Ekonomi	12	1. Semakin Berkembangnya Kebutuhan Pasar 2. Kurangnya Inovasi Wirausaha Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemuda 3. Kurangnya Ilmu Dan Keterampilan Yang Dimiliki Pemuda	1. Menurunnya Kepercayaan Diri Pemuda Untuk Memulai Wirausaha 2. Ide Inovasi Yang Dimiliki Pemuda Tidak	1. Sudah Ada Kebijakan Pergub Tentang Kewirausahaan 2. Sudah Ada Pelatihan Kewirausahaan Untuk Memberikan Ilmu Dan Bekal Kepada Pemuda 3. Sudah Ada Penerjunan	Disporapar Jateng	Tw III

				<p>4. Minimnya Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Pemuda Untuk Mengembangkan Wirausaha</p> <p>5. Minimnya Fasilitas Untuk Pemuda Agar Dapat Mengembangkan Wirausaha</p> <p>6. Kurangnya Modal Yang Dimiliki Pemuda Untuk Memulai Usaha</p>	<p>Dapat Dijalankan</p> <p>3. Kurang Berkembangnya Pemuda Dalam Sektor Ekonomi</p> <p>4. Kurangnya Minat Dari Pemuda Untuk Berwirausaha</p> <p>5. Kurangnya Lapangan Pekerjaan Yang Akan tercipta</p> <p>6. Kurangnya Wirausaha Sukses Di Usia Pemuda</p>	<p>Pemuda Potensial Ke Desa Untuk Mengembangkan Kemandirian Pemuda Dalam Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Ekonomi Pemuda</p>		
<p>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</p>	<p>Peningkatan Jumlah Lokus Unggulan Hasil Pendampingan Kepeloporan Pemuda</p>	<p>Kurang Berkembangnya Pemuda Peserta Program PKK di Desa Penempatan</p>	12	<p>1. Kurangnya modal awal yang dimiliki Peserta</p> <p>2. Kurangnya kemampuan membangun kepercayaan dari masyarakat</p> <p>3. Kurangnya keterbukaan dari masyarakat untuk berinovasi</p> <p>4. Kurangnya sarana dan prasarana di Desa Penempatan untuk mengembangkan diri</p> <p>5. Waktu yang dirasa masih kurang sehingga tidak bisa mendalami dan mengembangkan potensi desa</p> <p>6. Semakin minimnya jumlah pemuda di desa</p>	<p>1. Desa sulit untuk dilembangkan potensinya</p> <p>2. Jumlah pemuda di desa semakin berkurang karena minimnya lapangan pekerjaan</p> <p>3. Tidak adanya inovasi baru dalam pengembangan desa</p> <p>4. Produktivitas ekonomi di desa menjadi rendah</p>	<p>1. meningkatkan daya saing pemuda Jawa Tengah melalui kegiatan sosialisasi/pelatihan</p> <p>2. bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan stakeholder terkait</p>	<p>Disporapar Jateng</p>	<p>Tw III</p>
		<p>Jumlah pemuda kader provinsi dari seluruh kab/kota yang ditingkatkan kapasitas</p>	12	<p>kurangnya penyadaran dan daya saing pemuda di era globalisasi</p>	<p>1. kurang bersaingnya pemuda di era globalisasi</p>	<p>1. meningkatkan daya saing pemuda Jawa Tengah melalui kegiatan sosialisasi/pelatihan</p>	<p>Disporapar Jateng</p>	<p>Tw IV</p>

		daya saingnya			2. terkikisnya jiwa Nasionalisme 3. berkurangnya jiwa kepeloporan para pemuda	2. bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan stakeholder terkait		
	Jumlah wirausaha muda	Kurangnya Minat Pemuda untuk Berwirausaha dalam Upaya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi	12	1. Kurangnya modal untuk memulai berwirausaha 2. Kurangnya minat pemuda untuk memulai berwirausaha 3. Kurangnya sarana dan prasarana Pemuda untuk memulai wirausaha 4. Kurangnya fasilitas Pemuda untuk memulai wirausaha 5. Kurangnya ilmu dan kemampuan Pemuda dalam manajemen wirausaha 6. Kurangnya mentor bagi Pemuda untuk memulai wirausaha	1. Kurangnya kepercayaan diri Pemuda untuk mulai berwirausaha 2. Kurangnya inovasi wirausaha dari Pemuda 3. Kurangnya jumlah wirausaha dari Pemuda 4. Kurangnya lapangan pekerjaan baru	1. Pergub Tentang Kewirausahaan 2. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda 3. Penerjunan Pemuda Potensial Ke Desa	Disporapar Jateng	Tw III
	Tersedianya data capaian IPP domain Pendidikan; Kesehatan dan kesejahteraan; gender dan diskriminasi	penurunan moral dan pengetahuan pendidikan kesehatan	25	kurangnya pemahaman pemuda terhadap nilai-nilai luhur pancasila dan pengetahuan pendidikan kesehatan	menurunnya moralitas para pemuda terhadap kehidupan bermasyarakat dan kurangnya pengetahuan terhadap pendidikan kesehatan	Sudah Ada Sosialisasi Dan Pendampingan Pemuda Terkait Dengan Peningkatan Moralitas Dan Pengetahuan Pendidikan Kesehatan	Disporapar Jateng	Tw IV
	Jumlah Pemuda Aktif Dalam Berorganisasi	Rendahnya Kesadaran Pemuda Untuk Partisipasi Dalam Organisasi Kepemudaan	6	Kurangnya Sosialisasi Dan Pendampingan Pemuda Dalam Membangkitkan Kesadaran Untuk Pemuda Dalam Berpartisipasi	Kepesertaan Pemuda Dalam Organisasi Rendah	Peningkatan kegiatan kepemudaan	Disporapar Jateng	Tw IV
		Pemuda Enggan Untuk	20	Kurangnya Sosialisasi Dan	Kemandirian	Sudah Ada Sosialisasi Dan	Disporapar	Tw IV

		Berpartisipasi Dalam Organisasi Kepemudaan		Pendampingan Pemuda	Dan Karakter Pemuda Berkurang	Pendampingan Pemuda Terkait Dengan Kemandirian Dan Pembentukan Karakter Pemuda	Jateng	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan provinsi	kegiatan pemuda tidak terorganisir	25	kurangnya pemahaman pemuda untuk berorganisasi	tidak adanya organisasi kepemudaan	Sudah Adanya Pelatihan Kaderisasi Dan Organisasi Kepemudaan	Disporapar Jateng	Tw III
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Perolehan Medali	Tidak tercapai nya target perolehan medali	9	atlet-atlet yang berpotensi pindah ke daerah lain	perolehan medali tidak naik atau bahkan bisa jadi turun sebab perpindahan atlet-atlet berpotensi tersebut	peningkatan pembinaan atlet berpotensi yang terprogram dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga diharapkan mengurangi perpindahan atlet ke daerah lain.	Disporapar Jateng	Tw IV
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Peningkatan Jumlah Peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi	Tidak terselenggaranya kejuaraan/kompetisi	9	Minimnya alokasi dana yang dianggarkan untuk penyelenggaraan kejuaraan atau keikutsertaan/pastisipasi dalam kejuaraan olahraga	Beberapa pertandingan tidak terselenggara dengan baik dari segi teknis pertandingan dan yang lainnya.	komunikasi dengan pihak terkait (pengprov, koni, dll)	Disporapar Jateng	Tw IV
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Peningkatan Jumlah atlet berprestasi sesuai jenjang tingkat nasional	Kurang optimalnya penyediaan data dan informasi keolahragaan di Jawa Tengah	6	Data tidak di update secara berkala, Keterbatasan SDM yang berkompetensi di daerah	Penyediaan data keolahragaan tidak tersaji dengan baik sehingga masyarakat	informasi data keolahrgaan baik di daerah maupun di tingkat Provinsi harus di update secara berkala, melaksanakan bintek alikasi SIMPORA	Disporapar Jateng	Tw III

					atau stakeholder tidak mendapatkan informasi keolahragaan secara menyeluruh. Menurunnya daya saing keolahragaan di Jawa Tengah.	setiap kali terdapat pengembangan sistem dan melaksanakan Rakor Data Keolahragaan dengan daerah dan stakeholder		
Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan	Prestasi di tingkat olahraga pendidikan menurun	9	Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga Masih minimnya jumlah kompetisi/kejuaraan olahraga di Provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat olahraga pendidikan menurun dari tahun sebelumnya	Peningkatan pembinaan olahraga di tingkat pelajar Fasilitasi sarpras olahraga yang memadai	Disporapar Jateng	Tw IV
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Masyarakat Yang Bugar	Turunnya Tingkat Kebugaran Masyarakat	6	Masih Rendahnya Budaya	Turunnya Persentase Masyarakat	Optimalisasi Kegiatan Olahraga Kemasyarakatan	Disporapar Jateng	Tw IV
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Kawasan Pariwisata Yang Dikembangkan	Pengembangan Kawasan Pariwisata Tidak Disertai Dengan Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya	6	Perencanaan Lintas Sektoral Pada Pengembangan Kawasan Pariwisata Dari Segi Aksesibilitas, Atraksi, Amenitas, Aktivitas, Akomodasi, Dan Ancillary Kurang Terkoordinasi	Hasil Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Tidak Dapat Dimanfaatkan Secara Optimal	Koordinasi Dengan OPD Terkait Yang Dapat Mendukung Pengembangan Pendukung Pengembangan Kawasan Pariwisata	Disporapar Jateng	Tw IV
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Daya Tarik Wisata di Jawa Tengah yang tidak berdaya saing	1	Kurangnya inovasi atraksi wisata sesuai kebutuhan dan permintaan wisatawan	Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan di DTW	Melakukan Koordinasi Lintas Sektoral Untuk Menentukan Arah Kebijakan Sebagai Tindaklanjut	Disporapar Jateng	Tw III

Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	Pengembangan Aset Pariwisata Milik Provinsi Jawa Tengah	10	Penyedia tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Kontruksi untuk PPKom sesuai dengan ketentuan Kontrak	Tidak tercapainya progres fisik sesuai kesepakatan kontrak, dikarenakan pihak kontraktor tidak memiliki manajemen keuangan internal yang baik atau tidak memiliki cukup modal untuk melaksanakan pekerjaan, (walaupun sudah mencairkan uang muka dan termin pembayaran) sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi terhambat	Dalam Proses Penetapan Pemenang Ppkom Dibantu PPTK Harus Jeli Dan Cermat Dalam Mengecek Track Record Dan Keabsahan Kandidat Penyedia Jasa. Selalu Berkoordinasi Dengan Konsultan Pengawas Dan Kontraktor Untuk Melakukan Pengecekan Berkala Terhadap Progres Pekerjaan, Diadakan Rapat Progres Secara Rutin, Bahkan Apabila Perlu Jika Ditemukan Indikasi Penyelewengan Diterbitkan Surat Peringatan.	Disporapar Jateng	Tw II
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Usaha Pariwiata yang memiliki TDUP/NIB	Rendahnya9 pemenuhan standarisasi dan legalitas usaha pariwiata di Jawa Tengah	4	- Kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha pariwisata terkait standarisasi dan perizinan usaha pariwisata - Kurangnya pelaku usaha pariwisata terkait standarisasi dan perizinan usaha pariwisata	Menurunnya 99 kunjungan wisatawan dan terganggunya operasional usaha pariwisata karena belum terpenuhinya legalitas usahanya.	- Pembinaan Usaha Pariwisata - Pengawasan Usaha Pariwisata Di Daerah - Terinventarisasi Nya 13 Usaha Pariwisata	Disporapar Jateng	Tw IV
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Menurunnya Perjalanan Dan Lama Tinggal Wisatawan Di Jawa Tengah	6	Kurangnya Dukungan Kepada Rendahnya Melalui Adaptasi Teknologi Digital,	Berkurangnya Pengeluaran Konsumsi Wisatawan	Optimalisasi Promosi Pariwisata Melalui Media Digital	Disporapar Jateng	Tw IV

				Strategi Pemasaran Bersama, Dan Transisi Ke Arah Pariwisata Berkelanjutan				
		Menurunnya Jumlah Pengguna Sarpras Pemasaran Pariwisata	6	Kurangnya jenis media informasi pemasaran pariwisata yang digunakan dan materi / konten informasi pemasaran pariwisata yang kurang menarik	Menurunnya Traffic Pengguna Media Yang Dikelola Oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah	Mendorong Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota Untuk Mengirimkan Konten Terkait Pariwisata Di Wilayah, Mengadakan Lomba Foto Dan Lomba Video Untuk Meningkatkan Kualitas Konten Promosi Pariwisata	Disporapar Jateng	Tw IV
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengguna Media Sarpras Pemasaran Pariwisata	Menurunnya jumlah pengguna sarpras pemasaran pariwisata	6	Kurangnya jenis media informasi pemasaran pariwisata yang digunakan dan materi / konten informasi pemasaran pariwisata yang kurang menarik	Menurunnya traffic pengguna media yang dikelola oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah	Mendorong Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota Untuk Mengirim Konten Terkait Pariwisata Di Wilayah, Mengadakan Lomba Foto Dan Lomba Video Untuk Meningkatkan Kualitas Konten Promosi Pariwisata	Disporapar Jateng	Tw IV
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Kurang Optimalnya Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri	6	1. Terbatasnya Jumlah Sdm Pengelola Pendataan Di Daerah; 2. Terlambatnya Pelaporan Data Tiap Bulannya; 3. Luasnya Cakupan Lokus Pendataan; 4. Target Pasar Potensial Jawa Tengah Belum Optimal Dilakukan ; 5. Terbatasnya Penentuan Peserta Famtrip.	1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Sebagai Bahan Penyusunan Kebijakan; 2. Menurunnya Daya Saing Pariwisata Jawa Tengah	1. Melakukan Pengembangan Aplikasi Sisdaporapar Agar End-Usernya Bisa Sampai Ke Pengelola DTW Untuk Melakukan Penginputan Jumlah Kunjungan Wisatawan; 2. Rapat Koordinasi Per Tri Wulan; 3. Melakukan Koordinasi Permohonan Peserta Famtrip Dengan Dinas Pariwisata Di Luar Provinsi Jawa Tengah.	Disporapar Jateng	Tw IV
Pemasaran	Tujuan Pasar Wisata	Kurang optimalnya	6	1. Terbatasnya jumlah SDM	1. Belum	1. Melakukan	Disporapar	Tw IV

Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Potensial	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri		pengelola pendataan di daerah; 2. Terlambatnya pelaporan data tiap bulannya; 3. Luasnya cakupan lokus pendataan; 4. Target pasar potensial Jawa Tengah belum optimal dilakukan ; 5. Terbatasnya penentuan peserta famtrip .	optimalnya pemanfaatan data sebagai bahan penyusunan kebijakan; 2. Menurunnya daya saing pariwisata Jawa Tengah.	Pengembangan Aplikasi Sisdaporapar Agar End-Usernya Bisa Sampai Ke Pengelola DTW Untuk Melakukan Penginputan Jumlah Kunjungan Wisatawan; 2. Rapat Koordinasi Per Tri Wulan; 3. Melakukan Koordinasi Permohonan Peserta Famtrip Dengan Dinas Pariwisata Di Luar Provinsi Jawa Tengah.	Jateng	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Menurunnya Kualitas Promosi Pariwisata	6	Kurangnya Kualitas Promosi Dan Informasi Pariwisata	Menurunnya Minat Kunjungan Wisatawan Ke Jawa Tengah	Menggencarkan Promosi Pariwisata Melalui Media Sosial	Disporapar Jateng	Tw IV
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi Sarana Prasarana Kota Kreatif Yang Teruji Petik (Kabupaten/Kota Layanan)	Kab/Kota (Kata) Kreatif Yang Uji Petik Pmk3i Tidak Sesuai Target Waktu Yang Di Tentukan	6	Kurangnya Pemerataan Pemahaman Pelaku Usaha Parekraf Dalam Kesempatan Memperoleh Manfaat Serta Mempersiapkan Sdm Pada Sub Sektor Ekonomi Kreatif (Khususnya Kriya, Kuliner Dan Fashion) Dalam Pengisian Borang, Ujipetik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif.	Pengajuan Tidak Dapat Diproses Oleh Kemenparekraf	Memetakan Dan Mengidentifikasi Potensi Untuk Menetapkan Subsektor Ekraf Yang Bisa Menjadi Unggulan Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Pmk3i)		Tw III
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang PMK3I	Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang uji petik PMK3I tidak sesuai target waktu yang di tentukan	6	Kurangnya pemerataan Pemahaman pelaku usaha parekraf dalam kesempatan memperoleh manfaat serta mempersiapkan SDM pada Sub Sektor Ekonomi	Proses Pengisian dan pengajuan Uji petik Kab/Kota (KaTa) Kreatif menjadi lebih lama dan	Evaluasi Pengisian dan pengajuan Uji petik Kab/Kota (KaTa) Kreatif	Disporapar Jateng	Tw II

				Kreatif (Khususnya Kriya, Kuliner dan Fashion) dalam pengisian borang, ujipetik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif.	tidak sesuai dengan harapan (waktu tidak sesuai target)			
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi HKI	Kurang meratanya kesempatan bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memperoleh fasilitasi Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual	6	Keterbatasan anggaran untuk kegiatan tersebut	Kurang maksimalnya pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah yang tersertifikasi Hak Kekayaan Intelektual	Pemerataan Kuota Peserta Fasilitasi Sertifikasi HKI Tiap Kab/Kota	Disporapar Jateng	Tw III
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Dan Sdm Pariwisata Yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Kurangnya Mengimplementasikan Adaptasi, Inovasi, Dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dan Pelaku Parekrakraf	6	Rendahnya Komitmen Untuk Mendukung Penguatan Ekosistem Sektor Parekrakraf Melalui Pendekatan Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Parekrakraf Dalam Pembangunan Yang Berpusat Pada Masyarakat.	Tidak Meratanya Sdm Parekrakraf Yang Sudah Tersertifikasi	Penguatan Pengembangan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Melalui Sertifikasi	Disporapar Jateng	Tw III
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Kurangnya Mengimplementasikan Adaptasi, Inovasi, Kolaborasi Pemangku Kepentingan dan Pelaku Pariwisata	6	Rendahnya Komitmen untuk mendukung Penguatan Ekosistem Sektor Pariwisata melalui pendekatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) Pariwisata dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat.	Tidak Meratanya SDM Pariwisata yang sudah tersertifikasi	Penguatan Pengembangan SDM Pariwisata Melalui Pembekalan Dan Sertifikasi	Disporapar Jateng	Tw III
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif yang di latih dan	Kurang meratanya kesempatan bagi para pelaku ekonomi	6	Keterbatasan anggaran untuk kegiatan tersebut	Kurang maksimalnya pelaku ekonomi	Pemerataan Kuota Peserta Pelatihan Dan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	Disporapar Jateng	Tw IV

	disertifikasi	kreatif untuk memperoleh fasilitasi pelatihan ekonomi kreatif dan sertifikasi kompetensi			kreatif di Jawa Tengah yang terlatih dan tersertifikasi kompetensi	Tiap Kab/Kota		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	Kurangnya mengimplementasikan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi pemangku kepentingan dan Pelaku Parekrakraf	6	Rendahnya komitmen untuk mendukung penguatan ekosistem sektor parekrakraf Melalui pendekatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Parekrakraf dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat.	Tidak Meratanya SDM Parekrakraf yang sudah tersertifikasi	Penguatan pengembangan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif melalui sertifikasi	Disporapar Jateng	Tw IV
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (Pplop) Yang Berprestasi	Pembinaan Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (Pplop) Berprestasi Harus Ditingkatkan	9	Pembinaan Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (Pplop) Mempunyai Potensi Besar Dalam Mencetak Atlet Nasional	Dalam Pelaksanaan Pembinaan Atlet Prestasi Membutuhkan Fasilitas Dan Pengalaman Dalam Bertanding Yang Cukup, Kebutuhan Dalam Progam Uji Tanding Dan Pengiriman Kejuaraan Dibutuhkan Untuk Dapat Mengevaluasi Hasil Pelatihan Dalam Pembinaan	1. Memenuhi Kebutuhan Gizi Atlet 2. Melakukan Progam Uji Tanding 3. Mengikuti Kejuaraan Tingkat Nasional	Disporapar Jateng	Tw IV
Penyelenggaraan Kejuaraan	Peningkatan jumlah peserta yang	Berkurangnya peserta yang berpartisipasi	6	1. Minimnya alokasi anggaran untuk Pengiriman	Berkurangnya jumlah peserta	1. Peningkatan Anggaran Untuk Pengiriman	Disporapar Jateng	Tw II

Olahraga	mengikuti kejuaraan/kompetisi	dalam Kejuaraan		Kejuaraan 2. Jadwal event kejuaraan yang belum pasti	yang berpartisipasi dalam Kejuaraan	Kejuaraan 2. Berkoordinasi Dengan Kementerian Pemuda Dan Olahraga		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Peningkatan jumlah atlet dan pelatih berprestasi sesuai jenjang (Kelompok Umur) tingkat nasional	1. Atlet yang tidak mengikuti Pembinaan 2. atlet dan pelatih yang tidak berprestasi	16	1. Pembinaan Atlet yang kurang optimal 2. Kurangnya ketersediaan perlengkapan dan Sarana prasarana untuk Atlet Pelatih 3. Kurang Optimal Progam Pelatihan untuk Pelatih	Berkurangnya jumlah atlet dan pelatih milik daerah	1. Melakukan Efektifitas Pembinaan Atlet Dan Bekerjasama Dengan Stakeholder Terkait 2. Penambahan Perlengkapan Dan Sarana Prasarana Untuk Atlet 3. Bekerjasama Dengan Analis Olahraga Dalam Perancangan Progam Latihan	Disporapar Jateng	Tw IV
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah	Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah Masih Harus Ditingkatkan	9	Keterbatasan Kualitas Dan Kuantitas Sdm Pada Balai Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Kurang Cepat Penyelesaiannya, Dari Sisi Kepegawaian Masih Harus Ditingkatkan Pengelolaan Data Kepegawaiannya. Dari Sisi Administrasi Keuangan Penyelesaian Administrasi Keuangan Mengalami Keterlambatan	1. Berkoordinasi Dengan Pihak Terkait 2. Memotivasi Kepedulian Pegawai Terkait Pengelolaan Data Kepegawaian Yang Lebih Baik 3. Melakukan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Supaya Tidak Terjadi Keterlambatan 4. Memberdayakan Tenaga Non ASN	Disporapar Jateng	Tw III
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada	Proses klaim Asuransi sulit dilakukan	9	Data dukung Klaim Asuransi tidak lengkap	Klaim Asuransi tidak dapat dilakukan	Dibentuk SK Kepala Dinas Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	Disporapar Jateng	Tw III

Daerah	perangkat daerah							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Belanja Administrasi umum Perangkat Daerah yang dibutuhkan masih lebih banyak dari yang tersedia	9	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang tersedia terbatas	Memaksimalkan Pemanfaatan Anggaran Yang Tersedia Serta Melakukan Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaannya	Disporapar Jateng	Tw II
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Yang Dibutuhkan Masih Lebih Banyak Dari Yang Tersedia	9	Barang Milik Daerah yang ada saat ini sudah belum dapat memenuhi kebutuhan atlet, pelatih dan masyarakat pengguna sarana prasarana olahraga di kawasan olahraga jatidiri	Kurang efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan atlet, pelatih dan masyarakat pengguna kawasan olahraga jatidiri	Optimalisasi Penggunaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Sudah Ada	Disporapar Jateng	Tw I
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Penyediaan tidak tepat waktu	6	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat	Dibentuk SK Kepala Dinas Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	Disporapar Jateng	Tw I
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Meningkatnya Kerusakan Barang Milik Daerah dan Kerusakan Barang Milik Daerah terjadi secara bersamaan	9	Keterbatasan Anggaran dan Barang Milik Daerah yang biaya pemeliharaannya sangat mahal	Dengan kurang maksimalnya fungsi barang milik daerah mengakibatkan pelayanan umum dan masyarakat kurang maksimal dan terganggu	Melakukan Skala Prioritas Dalam Melakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disporapar Jateng	Tw III